



WARTA ISEI

Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah

Orkestrasi ISEI



Volume 1 No. 1, Juni 2024



ppisei_official



PP ISEI



<https://isei.or.id/>

WARTA ISEI

PENERBIT

Bidang Pengembangan Akademi,
Riset & Profesi Pengurus Pusat ISEI

PEMIMPIN UMUM

Perry Warjiyo, Ph.D.

PENANGGUNG JAWAB

Yoga Affandi, Ph.D.

KETUA DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.

SEKRETARIS DEWAN REDAKSI

Dr. Yuvensius Sri Susilo, M.Si.

DEWAN EDITOR AHLI

Prof. Dr. Muhammad Firdaus, M.Si.
Prof. Dr. Christantius Dwiatmadja, M.E.
Yohanes B. Kadarusman, Ph.D.
Mario Rosario Wisnu Aji, M. Ec. Dev.

MANAJEMEN REDAKSI

Aviliani
Anika Faisal
Lisawati

REDAKTUR PELAKSANA

Firman Sihol Parningotan, M. Ec.

WAKIL REDAKTUR PELAKSANA

Jonathan Ersten Herawan, S.E., CFAP.

SEKRETARIAT

Nuni Purwahyuni, SIP.
Efirilia Sukmagraha, SP.
Achmad Kusnadi
Suswanto

01 ISEI MENYAPA

Sambutan Ketua Dewan
Redaksi Warta ISEI

OPINI

02 Adopsi Digital Untuk
Kemajuan UMK

04 Kilas Balik Empat Tahun
Program Kartu Prakerja

07 Pengendalian Inflasi
Daerah di Wilayah
Sekarkijang

10 Jogja QRIStimewa

12 Menggali Potensi Lokal,
Menjadi Peluang Bisnis

14 *Nudge Theory* (Richard
Thaller): Memanusiawikan
Kembali Pengambilan
Keputusan Ekonomi

16 Mengatasi Inflasi Pangan:
Mengoptimumkan Peran
ISEI Cabang

18 Potensi Pariwisata untuk
Pertumbuhan Ekonomi
Sulawesi Utara

21 Kebaya dan Kain Batik
Sebagai Peningat Budaya
Di Banyuwangi

25 Merajut Pemahaman
Kecanduan: *Neuroeconomics*
dalam Pertarungan Antara
Kepuasan Instan dan
Jangka Panjang

28 *Economics of Cybersecurity*:
Perubahan Yang Membawa
Kerentanan

31 Proporsi Pelaku UMKM
Menuju Piramida Stasioner

PUBLIKASI ISEI

32 Kajian Kebijakan
Publik 4.0
Prosiding *The 46th*
Federation of ASEAN
Economic Associations

33 Kajian Terapan
Tahun 2022: ISEI Indeks
Prosiding Sidang Pleno
ISEI XXIII & SEMNAS ISEI
2023

34 Jurnal Ekonomi Indonesia
Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia (JEI ISEI)

KEGIATAN ISEI

35 Pelantikan ISEI Cabang
Yogyakarta dan
KAFEGAMA DIY

36 *Talkshow* Dialog
Ramadhan

37 Ngobrol Ramadhan ISEI
Cabang Yogyakarta
Edisi 03: UMKM Jogja
Gaspol

39 ISEI *Workshop Series*

47 KARIKATUR

Tech Savvy Generation

48 MARS ISEI

ISEI MENYAPA

Oleh **Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.**

Ketua Dewan Redaksi Warta ISEI, Pengurus Pusat ISEI Bidang III & Rektor PERBANAS *Institute*



Selamat datang di edisi perdana Majalah Warta ISEI!

Kami dengan bangga mempersembahkan Warta ISEI sebagai media baru dalam menyajikan pemikiran-pemikiran terkini seputar kemajuan ekonomi Indonesia. Dengan tujuan utama sebagai sumber informasi yang menjangkau masyarakat luas, kami berkomitmen untuk memberikan bacaan yang tidak hanya populer namun juga menjadi bahan diskusi yang berharga. Dalam edisi ini, kami menampilkan berbagai artikel yang mencerminkan sinergi antara pengurus pusat dan daerah ISEI.

Tujuan kami adalah tidak hanya memperkenalkan para tokoh ISEI di pusat dan daerah, tetapi juga menghadirkan beragam perspektif dalam menyikapi dinamika ekonomi daerah nasional maupun global.

Artikel-artikel yang disajikan mengulas berbagai aspek penting dalam pembangunan ekonomi, mulai dari program *social security*, pengendalian inflasi, potensi pariwisata, *digital payment*, hingga peran penting UMKM dan Perempuan dalam perekonomian Indonesia. Kami juga menghadirkan pemikiran-pemikiran teoritis yang relatif baru berkembang seperti *Nudge Theory*, *Neuroeconomics*, dan *Economics of Cybersecurity*, yang diharapkan dapat menginspirasi pembaca dalam memahami berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi.

Selain itu, kami juga menyajikan informasi mengenai program kerja ISEI yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan, serta publikasi dan kegiatan dari cabang-cabang ISEI di berbagai daerah. Ini menjadi bukti konkret bahwa ISEI tidak hanya menjadi wadah untuk bertukar pikiran, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam memajukan ekonomi Indonesia dari berbagai lini.

Mari bersama-sama menjadikan majalah ini sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika ekonomi, serta untuk mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia yang lebih baik. Selamat Membaca!

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.

Ketua Dewan Redaksi



LAMEMBA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

**Berkomitmen untuk Meningkatkan Kualitas
Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Member of

INAAHE
Full Member

apqn
ASIA-PACIFIC QUALITY NETWORK

In cooperation with

AACSB
Business Education.
Connected.



lamemba.or.id



[lamemba.id](https://www.instagram.com/lamemba.id)



[lamemba](https://www.facebook.com/lamemba)

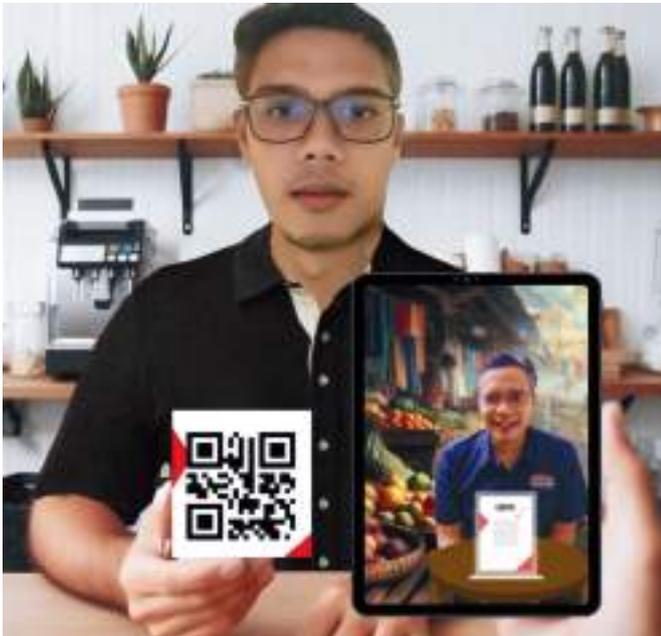


[lamemba](https://www.youtube.com/lamemba)

Adopsi Digital Untuk Kemajuan UMK

Oleh Yoga Affandi, Ph.D.

Direktur Eksekutif/Kepala Bank Indonesia Institute &
Sekretaris Umum Pengurus Pusat ISEI



Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memegang peranan penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang, karena kemampuannya menciptakan lapangan pekerjaan. Keberlangsungan hidup banyak rumah tangga bergantung pula pada pendapatan yang dihasilkan UMK. Lebih dari itu, pada saat krisis UMK berperan signifikan sebagai jaring pengaman sosial dengan menyediakan lapangan kerja alternatif. Meski berbagai kebijakan dan fasilitas pendukung telah dilakukan, produktivitas dan keberlanjutan UMK masih menghadapi banyak tantangan.

Dalam dua dekade terakhir, era digital tengah melanda dunia menyentuh seluruh sendi perekonomian, didorong utamanya oleh penetrasi internet dan gawai pintar (*smart phone*). Penerapan teknologi digital membuka peluang besar bagi UMK untuk mengembangkan usahanya. UMK pun mulai mengadopsi teknologi digital dalam kegiatan bisnis mereka, seperti *e-commerce* dan pemasaran *online*, pembayaran digital, dan *e-procurement*. Namun, tingkat adopsi teknologi digital oleh UMK masih tidak merata. Fenomena digital divide terjadi dimana infrastruktur digital yang tidak merata dan tingkat literasi digital yang rendah serta daya beli yang lemah sehingga keterjangkauan piranti gawai pintar dan harga data yang relatif mahal masih menjadi kendala.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti manfaat adopsi teknologi digital oleh UMK. Di berbagai negara, transformasi digital terbukti berdampak signifikan terhadap aktivitas bisnis, daya saing, biaya input, akses ke keuangan, dan permintaan tenaga kerja terampil. Di Indonesia, Trinugroho et al (2022) menemukan bahwa adopsi teknologi digital sangat penting bagi UMK, terutama selama pandemi *COVID-19*. Wirdiyanti et al (2022) menemukan dampak positif adopsi digital di tahap *e-commerce* terhadap kinerja UMK. Selain itu, adopsi teknologi digital juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan karena semakin banyak transaksi yang dilakukan menggunakan layanan perbankan.

Penting kiranya untuk mengukur kemampuan adopsi digital UMK di Indonesia sehingga didapat pemahaman terhadap proses adopsi digital pada UMK. [1] Studi terkini dari Affandi et al (2024) telah mengidentifikasi lima proses bisnis UMK yang berpotensi ditransformasikan secara digital, yakni: (i) pembelian bahan baku (*e-procurement*), (ii) perdagangan online (*e-commerce*), (iii) pencatatan dan pembukuan administratif (*point of sales*), (iv) pembayaran konsumen, (iv) pemasaran (*e-marketing*), dan (v) pembayaran digital.

Indeks adopsi digital yang dibangun melalui survei kolaborasi antara Bank Indonesia *Institute* dan Universitas Sebelas Maret (*UNS Fintech Centre*) pada 5.035 pelaku UMK di 17 propinsi ini tidak hanya mengidentifikasi sejauh mana UMK telah mengadopsi teknologi digital, tetapi juga mempertimbangkan dimensi pemanfaatan dan penggunaan untuk mengukur tingkat adopsi secara lebih tepat. Survey direncanakan secara longitudinal dan akan diperluas di 2024 sehingga perkembangan UMK bisa senantiasa dimonitor. Hal ini diharapkan semakin memperkuat berbagai kebijakan yang telah dilakukan, seperti Pemerintah Indonesia dan otoritas keuangan yang telah banyak mendorong dan memfasilitasi UMK untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses bisnis mereka. Misalnya, Bank Indonesia telah mengkampanyekan agar UMK menggunakan QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*) untuk memudahkan pembayaran digital (*cashless*).

Hasil survey 2023 menunjukkan profil UMK Indonesia yang menarik.

- Karakteristik Pemilik UMK adalah muda, perempuan dan lebih berpendidikan dibandingkan dengan rata-rata nasional: Pemilik UMK yang berusia muda dengan rentang umur 15-44 tahun mendominasi UMK sebesar 77%. Kepemilikan UMK oleh perempuan sebesar 62,7%, amat kontras dengan angka penyerapan tenaga kerja nasional yang hanya sebesar 37%. Dari sisi pendidikan, 73% pemilik UMK berpendidikan SMA ke atas. Kontras dengan angkatan kerja kita yang 60% masih berpendidikan SMA ke bawah, menyiratkan potensi pengembangan UMK kedepan.
- Kondisi Perusahaan: Ukuran perusahaan di survey studi ini sebagian besar ultra mikro, 78% merupakan bisnis informal dan 62% tidak memiliki ijin usaha sehingga masih terdapat ruang untuk peningkatan kapasitas menjadikan UMK yang formal. Literasi keuangan UMK juga masih rendah, tertangkap dari mayoritas UMK terutama di luar Jawa yang masih menggabungkan rekening pribadi dan rekening usaha. Dalam hal ini upaya peningkatan literasi keuangan UMK juga merupakan agenda strategis yang sejalan dengan peningkatan literasi digital.
- Lingkungan Bisnis: Di sisi lain, tingkat persaingan usaha yang ketat dan ketersediaan pelatihan digital bisa mendorong UMK "go digital". Dalam hal ini, munculnya tekanan dari kompetitor industri sejenis dan dukungan pelatihan digital membuat UMK sadar pentingnya teknologi.
- Kualitas Infrastruktur: Akses internet yang lancar dan terjangkau tak bisa dikesampingkan. Tanpa internet yang stabil, sulit menjalankan bisnis digital.
- Budaya Digital: Lingkungan sekitar yang mendukung dan akrab dengan teknologi digital turut mempengaruhi. Jika tetangga sudah berjualan *online*, tentu muncul motivasi untuk mengikuti jejak mereka.

Studi menunjukkan bahwa pengukuran indeks adopsi digital untuk aspek *point of sales*, yakni aspek pencatatan transaksi keuangan secara elektronik adalah yang terendah. Tiga faktor penyebabnya yakni persepsi bahwa pencatatan tersebut menyulitkan, literasi digital rendah dan masalah biaya. Padahal, ini dapat berimplikasi pada sulitnya akses pembiayaan bagi UMK.

Pencatatan keuangan seperti neraca, laporan rugi laba dan arus kas merupakan standar dokumen yang dibutuhkan perbankan/lembaga pembiayaan untuk mengevaluasi kinerja UMK, sehingga adopsi digital seperti aplikasi laporan keuangan UMK yang membantu pencatatan keuangan UMK, dapat membuka kesempatan bagi UMK untuk mendapatkan pembiayaan ekspansi usaha dari lembaga keuangan formal, yang berujung pada pengurangan informal ekonomi.

Temuan studi juga menunjukkan hubungan positif antara adopsi digital dan kinerja bisnis, khususnya peningkatan penjualan. UMK yang memanfaatkan teknologi digital mengalami pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan yang masih konvensional. Hal ini tidak mengherankan, dengan platform digital, jangkauan pasar UMK menjadi luas.

Studi ini juga menunjukkan bahwa adopsi digital mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan literasi keuangan, bahwa peningkatan adopsi digital di kalangan UMK juga berhubungan dengan peningkatan pengetahuan keuangan mereka. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan produktivitas bisnis mereka secara keseluruhan. Semakin terintegrasi dengan teknologi digital, UMK semakin paham tentang keuangan. Hal ini bisa dipahami karena banyak *platform* digital yang menawarkan fitur-fitur keuangan, seperti pencatatan keuangan *online*, manajemen risiko, dan akses ke produk keuangan. Dengan menggunakan fitur-fitur tersebut, pemilik UMK terbiasa mengelola keuangan usahanya dengan baik dan berpotensi membuat UMK naik kelas.

Adopsi digital pada UMK adalah sebuah keniscayaan. UMK yang dimiliki kebanyakan oleh generasi muda, perempuan dan berpendidikan menyimpan potensi besar untuk tumbuh. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, dukungan pembiayaan dari sektor keuangan, pembangunan ekosistem digital yang inklusif, dan kemauan belajar untuk terus meningkatkan daya saing, UMK yang *go digital* tidak hanya akan meningkatkan penjualan dan nilai tambah, tetapi juga diyakini akan menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia.

Kilas Balik Empat Tahun Program Kartu Prakerja

Oleh **Denni P. Purbasari, Ph.D.**

Direktur Eksekutif PMO Prakerja, Pengajar FEB Universitas Gadjah Mada & Pengurus Pusat ISEI Bidang II



Empat tahun sudah Program Kartu Prakerja (“Prakerja”) hadir. Bermula di Sentul *International Convention Center*, 24 Februari 2019, Bapak Joko Widodo, sebagai petahana, menyebutkan Prakerja sebagai salah satu janji kampanyenya untuk periode ke-2.

Lebih dari seratus diskusi/konsultasi pun diadakan usai Pemilu dilaksanakan. Segala aspirasi ditimbang, beragam data dibaca, untuk mencari bentuk program. Karena, program pelatihan berskala 2 juta orang per tahun tak pernah ada sebelumnya. Akhirnya, pada 26 Februari 2020, Peraturan Presiden 36 Tahun 2020 tentang Prakerja ditetapkan.

Lewat PERPRES ini, Komite Cipta Kerja (“KCK”) dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (“PMO”) dibentuk. KCK diketuai oleh MENKO Perekonomian, beranggotakan Menteri dan Kepala Lembaga. Ada MENDIKBUD, MENKEU, MENAKER diantaranya. KCK bertugas menyusun kebijakan dan mengendalikan Prakerja, yang bertanggung jawab pada Presiden. Sementara, PMO bertindak sebagai implementing agency Prakerja yang bertanggung jawab pada Menko Perekonomian. Sebulan sesudah PERPRES dikeluarkan, Permenkoekonomi dan PMK sebagai aturan pelaksanaannya menyusul kemudian.

Karena *COVID-19*, PMO yang masih bayi harus segera bekerja. Diangkat pada 17 Maret 2020, dalam tiga hari, situs www.prakerja.go.id dan Instagram @prakerja.go.id tercipta. Lewat situs, landasan hukum, syarat dan ketentuan, tahapan, kebijakan privasi, *FAQ*, dan kanal *contact center* dapat dibaca. Sedangkan lewat Instagram (kini 4,4 juta orang *followers*), sosialisasi, edukasi, dan komunikasi dilakukan.



Akhirnya, gelombang pertama Prakerja dibuka. Tepatnya pada 11 April 2020 atau sehari pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tak tanggung-tanggung, langsung 164.000 orang. Belum sampai 5 jam, 2 juta orang sudah mendaftar. Untungnya server tidak *down*. Jadi, keputusan direksi sejak awal untuk menggunakan cloud dan membangun sistem dan proses sendiri (bukan *vendor*) sudah benar.

Pelatihan yang semula direncanakan ada *offline* dan *online*, mendadak cuma bisa *online*. Bantuan biaya pelatihan yang awalnya sekitar 3-7 juta Rupiah akhirnya hanya sejuta Rupiah. Sebaliknya, insentif pasca pelatihan yang semula hanya Rp650.000 diubah menjadi Rp600.000 per bulan selama 4 bulan berturut. Karena, pandemi membuat banyak orang tidak bisa bekerja. Jadi, Prakerja harus beradaptasi menjadi bagian dari program perlindungan sosial.

Anggaran jumbo, program baru, kelembagaan baru, dan cara-caranya yang baru memantik banyak tanda tanya dan curiga. Tak kurang KPK, BPK, BPKP, KPPU, LKPP, hingga ICW.

Prakerja pun dihentikan setelah sebulan berjalan. Dari Mei-Juli, aturan disempurnakan; satu per satu isu diselesaikan. Akhirnya, Prakerja dibuka lagi pada 7 Agustus 2020 untuk 800.000 peserta. Karena, tiga bulan sudah waktu tertunda.

Tahun demi tahun berlalu. Episode *COVID-19* pun usai. Di tahun 2023, Prakerja kembali kepada khittahnya. Menjadi program *reskilling* dan *upskilling* saja. Bagian dari pendidikan non-formal dan informal kita yang mendorong pembelajaran sepanjang hayat untuk orang dewasa. Bukan lagi sebagai perlintas di kala bencana. Di skema normal ini, insentif diturunkan menjadi Rp600.000; dan sebaliknya, bantuan biaya pelatihan dinaikkan menjadi Rp3.500.000. Orang bisa memilih pelatihan *online*, *offline*, atau dua-duanya.

Hingga kini Prakerja telah memberikan akses pelatihan kepada 18 juta jiwa se-Indonesia, tanpa kecuali. Mendaftar langsung tanpa antri atau fotokopi. Pelatihannya pun bisa dipilih sendiri dan difilter menurut metode ajar, harga, usia, pendidikan, rating, kategori, lokasi, hingga durasi. Ada IT, perkantoran/administrasi, gaya hidup, keuangan, penjualan/pemasaran, alat berat, hingga kewirausahaan. *Pre-test*, kuis, *post-test*, ujian, rating, maupun ulasan, semua harus dilalui.

Rekening insentif juga bisa dipilih peserta sendiri. Ada 2 bank dan 4 *e-money*. Semua harus ter-KYC dan atas nama peserta sendiri. Insentif yang diterima utuh karena tanpa *fee*. Ada survei evaluasi bila mau diisi. Semua tersedia di *dashboard* pribadi.



Lewat *machine learning*, setiap penerima Prakerja bisa memperoleh rekomendasi pelatihan sekaligus rekomendasi pekerjaan sesuai dengan bidang pelatihan yang diselesaikan. Peserta tinggal klik untuk melamar pekerjaan dan melampirkan sertifikat pelatihan. Kini ada 90.000 lowongan pekerjaan di fitur "Info Pekerjaan".

Belasan studi dan survei evaluasi (www.prakerja.go.id/publikasi) menyimpulkan Prakerja berarti: meningkatkan kompetensi, kebermanfaatan, kewirausahaan, pendapatan, ketahanan pangan dan finansial, hingga inklusi keuangan. Juga menciptakan kebiasaan bekerja/belajar baru dan meningkatkan penggunaan sertifikat pelatihan untuk melamar pekerjaan.



Adaptability, *accountability*, efikasi, efisiensi, interoperabilitas, dan keunikan Prakerja sebagai program pelatihan berskala besar-inklusif berskema *public-private partnership* kini telah dikenal bahkan diapresiasi dunia. Prakerja terpilih sebagai salah satu praktik baik *SDG* yang dipresentasikan di markas besar PBB di New York. *ADB* memuji Prakerja karena keunikannya sebagai *safety trampoline* di masa pandemi. Prakerja juga telah direplikasi oleh Cambodia dan dipelajari oleh *EEF* Thailand.



Sebagai penutup, ada 3 pelajaran bisa ditarik dari perjalanan Prakerja. Pertama, laiknya sebuah inovasi, *imperfections* pasti ada; oleh karenanya, kita perlu memberikan "space" bagi program baru untuk terus memperbaiki. Memahami, sebelum menghakimi

Kedua, sebuah program akan berhasil bila beradaptasi; bukan *business-as-usual*. Karena, perubahan konteks sosial-ekonomi pasti terjadi. Dan pastikan, di setiap perubahan, *data-evidence* menjadi dasar; kepentingan *users* menjadi sentral, karena sejatinya program dibuat untuk mereka. Fleksibilitas dan empati ini penting, untuk membuat program terus relevan dan optimal.



Ketiga, Prakerja adalah tentang Indonesia. Indonesia yang raya, yang bukan hanya Jawa. Indonesia yang ingin kaya nanti di 2045. Karenanya, semua pihak bekerja sama untuk kerja skala juta. Dan oleh karenanya juga, tim Prakerja telah menapak di bumi Merauke, Biak, Supiori, Seram Barat, Kepulauan Talaud, Sigi, Donggala, Tojo Una Una, Alor, Sumba Barat, Rote, Tanjung Selor, Sintang, Sumbawa, Lubuklinggau, Mentawai, Nias, Sabang, dan lainnya. Peralnya, berada di awan (“*cloud*”) tak cukup untuk menggapai tangan-tangan. Tak cukup untuk mendapatkan imaji yang tepat tentang Indonesia.

Pengendalian Inflasi di Wilayah Sekarkijang

Oleh Dr. Ciplis Gema Qori'ah, S.E., M.Sc.

Sekretaris I ISEI Jember & Dosen FEB Universitas Jember



Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Diskusi menarik tentang inflasi daerah telah diselenggarakan dalam agenda Konferensi Ekonomi Sekarkijang (KONEKSI) tepatnya pada 7 Maret 2024 di Gedung Serbaguna Bank Indonesia Jember. Konferensi Ekonomi yang bertajuk “Pengendalian Inflasi Daerah dan Kebijakan Rantai Pasok Produk Pangan” mengulas tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.

Sekarkijang merupakan penggabungan nama kabupaten yang menjadi wilayah kerja Bank Indonesia Jember yang masuk dalam wilayah Eks-Karesidenan Besuki yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lumajang. Konferensi ini digagas untuk pertama kalinya dari hasil diskusi antara Bank Indonesia Jember dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jember tentang perkembangan ekonomi wilayah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai agenda reguler tiga bulanan untuk membahas berbagai isu terkait stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di wilayah Sekarkijang.

Konferensi ekonomi ini dihadiri oleh pembicara kunci Wakil Bupati Jember Bapak K.H. Muhammad Balya Firjaun Barlaman, Bank Indonesia Jember, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember, Akademisi Universitas Jember dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jember. Pemilihan topik inflasi dalam konferensi ekonomi kali ini dilatarbelakangi oleh terjadinya lonjakan harga bahan pokok terutama komoditi beras sejak awal tahun hingga awal Maret 2024. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat bahwa harga beras medium telah melampaui harga di tingkat pedagang eceran dan harga eceran tertinggi di 38 provinsi.

Bapanas menetapkan harga beras medium bervariasi berdasarkan provinsi dengan kisaran 9.450 – 10.250 rupiah per kilogram. Namun pada minggu akhir bulan Februari 2024, rata-rata harga beras medium di tingkat pedagang eceran melonjak pada kisaran 11.800 rupiah per kg hingga 22.250 rupiah per kg. Kenaikan harga beras ini secara umum diakibatkan oleh belum memasuki masa panen dan meningkatnya lahan pertanian yang rusak akibat musim kemarau panjang, sehingga petani mengalami gagal panen.

Sebagai bentuk strategi antisipasi kenaikan harga bahan pokok, pada 8 Maret 2024 pemerintah daerah Kabupaten Jember dan lembaga terkait telah menyelenggarakan rapat koordinasi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Jember. Pemantauan dan sinergi pengawasan yang intensif bersama satgas pangan merupakan hal mutlak dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan yang menyebabkan kelangkaan pasokan bahan pokok di pasar. Menggelar operasi pasar dengan harga yang telah ditetapkan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), akan mengurangi tekanan daya beli masyarakat terutama memasuki bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Meski demikian, dalam jangka panjang (*long term*) diperlukan kebijakan yang lebih konkret oleh lembaga terkait untuk mengatasi kelangkaan pasokan bahan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga ekonomi terus tumbuh.

Secara umum di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto: PDRB) di lima wilayah Sekarkijang menunjukkan Kabupaten Banyuwangi berada pada peringkat teratas mencapai 5,03 persen, Kabupaten Lumajang 5,0 persen, Kabupaten Jember 4,93 persen, Kabupaten Situbondo 4,90 persen dan Kabupaten Bondowoso mencapai 4,62 persen. Sedangkan berdasarkan skala ekonomi, Kabupaten Banyuwangi memimpin skala ekonomi tertinggi mencapai 101 triliun rupiah, Kabupaten Jember mencapai 95 triliun rupiah, Kabupaten Lumajang 40 triliun, Kabupaten Situbondo dan Bondowoso mencapai 25 triliun rupiah. BPS juga mencatat pertumbuhan sektor utama wilayah Sekarkijang berasal dari sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,52 persen, sektor perdagangan sebesar 6,10 persen, sektor konstruksi sebesar 6,05 persen, sektor pengolahan sebesar 5,90 persen dan terakhir ditempati sektor pertanian sebesar 2,46 persen. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha, kontribusi terbesar justru

disumbangkan dari sektor pertanian mencapai 28,37 persen, sektor pengolahan sebesar 18,33 persen, sektor perdagangan sebesar 15,72 persen, sektor konstruksi sebesar 9,96 persen serta sektor pertambangan dan galian mencapai 4,78 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi tertinggi sebesar 69 persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 24 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5 persen dan sisanya kontribusi dari lembaga *non profit* yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan yang lain sebesar 2 persen.

Inflasi di wilayah provinsi Jawa Timur tahun 2023, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi merupakan dua kabupaten dengan pencapaian inflasi terendah masing-masing sebesar 2,29 persen dan 2,15 persen lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sumenep mencapai hingga 5,08 persen, Kota Surabaya 3,03 persen, Kabupaten Probolinggo mencapai 2,86 persen, Kabupaten Kediri mencapai 2,64 persen, Kota Malang sebesar 2,56 persen dan Kabupaten Madiun sebesar 2,35 persen. Di Kabupaten Jember, berdasarkan data historis 3 tahun terakhir, komoditas yang menyebabkan inflasi adalah minyak goreng mencapai 27,27 persen dengan kontribusi 0,43 persen di tahun 2021, tempe menyebabkan inflasi sebesar 33,90 dengan sumbangan sebesar 0,33 persen di tahun 2022 dan beras menyebabkan inflasi sebesar 17,87 persen dengan kontribusi sebesar 0,90 persen di tahun 2023. Komoditas yang persisten menyebabkan inflasi setiap tahunnya adalah tahu mentah, tempe dan beras. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga kedelai dunia yang cenderung naik dimana presentase impor kedelai masih tergolong tinggi. Pengrajin tahu dan tempe lebih memilih kedelai impor dengan ukuran yang lebih besar dan warna yang lebih bersih. Sedangkan inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga beras disebabkan oleh peningkatan harga beras di awal tahun yang didorong oleh masuknya musim tanam padi dan peningkatan harga beras menjelang akhir tahun didorong oleh alih tanam petani ke tanaman jagung pada siklus tanam pada bulan Agustus hingga November. Selain itu tren meningkatnya kenaikan harga beras diakibatkan meningkatnya biaya produksi akibat berkurangnya alokasi pupuk subsidi dalam dua tahun terakhir.

Untuk mengatasi problema klasik kenaikan harga barang, diperlukan strategi kebijakan yang afirmatif baik bagi petani maupun bagi konsumen, atau yang umum dikenal sebagai harga keekonomian. Karena pada dasarnya inflasi itu indikator tingkat daya beli masyarakat berdasarkan pendapatan rata-rata yang diterima oleh masyarakat.

Dalam jangka pendek, pendapatan masyarakat cenderung tidak berubah, sehingga harga-harga secara umum harus dijaga supaya relatif stabil dan minim gejolak. Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang mempunyai kewenangan untuk menjaga inflasi supaya bahan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik. Secara teoritis, inflasi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, pertama; inflasi inti yaitu komponen inflasi yang cenderung stabil atau persisten (*persistent component*) dalam pergerakannya dan dipengaruhi faktor fundamental, yaitu interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar rupiah, harga komoditi internasional dan perkembangan ekonomi global) dan ekspektasi (harapan) inflasi di masa depan, kedua; inflasi non inti yaitu komponen inflasi yang cenderung memiliki ketidakstabilan yang tinggi (*volatility*) karena dipengaruhi oleh faktor fundamental.

Komponen inflasi non inti terdiri dari inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) dan inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah (*administered price*). Inflasi komponen bergejolak yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan (*shocks*) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun komoditas pangan internasional. Sedangkan inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah (*administered price*) yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan (*shocks*) berupa kebijakan pemerintah seperti BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan dan yang sejenisnya. Pengendalian inflasi merupakan hal yang penting karena didasarkan atas pertimbangan bahwa ketidakstabilan harga akan berdampak buruk terhadap sosial ekonomi masyarakat, di antaranya: i) menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun yang akan menyebabkan standar hidup masyarakat juga akan turun, ii) menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dalam berkonsumsi, berinvestasi dan memproduksi. Sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi, iii) tingkat inflasi dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi luar negeri akan berakibat pada tingkat bunga domestik riil menjadi kurang kompetitif sehingga berpengaruh terhadap ketahanan nilai tukar rupiah, iv) kestabilan harga berpengaruh positif terhadap upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan hasil diskusi dalam Konferensi Ekonomi Sekarkijang bahwa untuk mengendalikan inflasi dan memperbaiki rantai pasok pangan diperlukan sinergitas kebijakan antara lembaga, pemerintah daerah serta dinas-dinas terkait. Kompleksitas permasalahan inflasi disebabkan oleh distribusi rantai pasok yang terhambat, pemilu dan hari besar keagamaan nasional (HKBN).

Meskipun keberhasilan dari setiap strategi dan kebijakan tidak selalu dapat dilihat secara langsung, sinergi antara berbagai pihak dianggap sebagai kunci untuk mencapai dampak positif dalam jangka panjang. Bapedda menjalankan perannya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM dan pertanian. Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, BAPPEDA mengambil langkah pengendalian inflasi daerah melalui berbagai strategi, yaitu melanjutkan program pemberdayaan ekonomi dan UMKM, operasi pasar dan pengendalian harga. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemanfaatan APBD, operasi pasar dan sidak, Kawasan Pangan Lestari serta kerjasama lintas lembaga. Dalam konteks langkah-langkah pengendalian inflasi yang dijabarkan, perlu digali lebih dalam mengenai dampak dan efektivitasnya. Langkah-langkah di sektor ketahanan pangan juga dibutuhkan seperti data luas lahan, kepemilikan, kebutuhan sarana produksi, penanganan pasca panen, pelaku rantai pasok bahan pangan serta alur distribusi komoditas dari kota satu ke kota yang lain. Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan diperlukan penataan sistem kelembagaan (*institutional arrangement*) yang tepat dari hulu hingga hilir seperti yang diungkap oleh Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) Bapak Ekonomi Kelembagaan dalam mazhab *The Old Institutional Economics*.

Jogja QRIStimewa

Oleh Dr. Yuvensius Sri Susilo, S.E., M.Si.

Pengurus Pusat ISEI Bidang III, Sekretaris ISEI Yogyakarta &
Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Menurut Gouw (2019), era keuangan digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran dari uang kartal (kertas dan logam) dan *paper based* (cek, bilyet giro, dan nota (kredit atau nota debit) menuju *card based* dan *server based* (Sri Susilo, 2020). *Card* atau *chip based* meliputi kartu ATM, kartu kredit/debit, dan uang elektronik (UE) yang berbasis *chip* (kartu) yang dapat di isi saldo, misalnya KUE di SPBU dan jalan tol. Selanjutnya, *server based* menggunakan *platform* aplikasi yang penggunaannya meningkat seiring perkembangan ekonomi digital, misalnya *mobile payment* dengan pemindaian kode *Quick Response (QR)*.

Bank Indonesia (BI) mewajibkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan standar *Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS)* mulai 1 Januari 2020 (Sri Susilo, 2020). Ketentuan BI tersebut diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Menurut BI (2019), kode *QR* ini digunakan untuk pembayaran melalui aplikasi *UE server based*, dompet elektronik dan *mobile banking* (Sri Susilo, 2021). Setiap PJSP berbasis *QR* (termasuk PJSP asing) wajib menggunakan *QRIS*.

QRIS adalah singkatan dari *Quick Response Indonesia Standard* dan merupakan *QR Code* yang sudah dirancang mengikuti standar nasional Indonesia (Sri Susilo, 2020). *QRIS* ini hadir sebagai jawaban atas transaksi pembayaran *online* yang semakin berkembang dengan cepat. Saat ini banyak penyedia layanan pembayaran digital yang bisa digunakan untuk transaksi. Jika pembeli membayar maka cukup scan *QR Code* yang tersedia dan transaksi bisa diproses dengan cepat.

Sebelum adanya *QRIS* tiap-tiap aplikasi pembayaran digital di Indonesia memiliki *QR Code*-nya sendiri (Sri Susilo, 2021). Contohnya, jika ada 10 aplikasi pembayaran digital yang ingin Anda gunakan, maka Anda perlu memiliki 10 jenis *QR Code*. *QRIS* dihadirkan dengan tujuan yang baik, yaitu mempermudah transaksi dengan aplikasi pembayaran digital. Untuk itu, *QRIS* juga menawarkan manfaat untuk pihak-pihak yang menggunakannya, yaitu pembeli dan penjual.

Tulisan pendek ini mencoba mendeskripsikan perkembangan penggunaan *QRIS* di wilayah DIY, khususnya penggunaan *QRIS* oleh UMKM dan pelaku pariwisata. Seperti diketahui, DIY merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Di samping itu, mayoritas 99 persen pelaku usaha (termasuk pelaku usaha pariwisata) di wilayah DIY merupakan pelaku UMKM. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka penggunaan *QRIS* menjadi hal yang penting mendukung transaksi usaha mereka.

Berdasarkan data BI DIY (2024), pengguna perkembangan jumlah *merchant QRIS* di DIY 641 ribu *merchant* posisi 31 Juli 2023. Bertambah 81.136 dibandingkan per bulan Desember 2022. Sementara pengguna *QRIS* 694 ribu posisi 31 Juli 2023 naik 153.444 dibandingkan Desember 2022. Capaiannya 58,76 persen dari target *user QRIS* 2023. Pada tahun 2023, capaian *merchant QRIS* di DIY mencapai 711.972 *merchant* dimana 55 persen didominasi oleh kategori Usaha Mikro Kecil (UMK). Pada periode yang sama jumlah pengguna mencapai 821.600 dan volume transaksi sebesar 64,56 juta.

Dari data tersebut maka sebagian dari usaha mikro telah menggunakan fasilitas *QRIS* dalam transaksi pembayaran. Bagi pelaku UMK, *QRIS* setidaknya memiliki 3 manfaat, yaitu (Sri Susilo, 2019 dan Sri Susilo, 2020): (1) proses transaksi lebih mudah, (2) mencegah beredarnya uang palsu, dan (3) pendaftaran merchant (pelaku mikro-kecil) lebih mudah.

Harus diakui, kehadiran *QRIS* otomatis membuat proses transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Masyarakat atau pembeli hanya perlu memiliki satu *QR Code* saja untuk melayani berbagai aplikasi pembayaran digital yang sudah mendapatkan izin di Indonesia. Kondisi ini menjadikan tampilan meja kasir menjadi lebih modern dan lebih rapi karena tidak perlu memasang *QR Code* berjejer-jejer. Setiap satu merchant hanya perlu menempelkan *QR Code* yang didapat dari *QRIS*.

Manfaat yang kedua adalah mengurangi risiko mendapatkan uang palsu. *QRIS* merupakan kode pembayaran digital. Dengan demikian, tidak ada lagi pertukaran uang tunai yang terjadi. Hal ini juga berarti kemungkinan mendapatkan uang palsu semakin kecil, termasuk juga mencegah penyakit yang bisa ditularkan lewat bersentuhan langsung di saat pandemi *COVID-19*.

Selanjutnya, keuntungan yang ketiga ada pada pendaftaran merchant atau toko yang dimiliki pelaku UMK lebih mudah. Dengan *QRIS*, penjual atau pedagang hanya perlu mendaftar sekali untuk menerima pembayaran digital melalui aplikasi apapun.

Konsumen atau pembeli juga memperoleh manfaat dengan tersedianya *QRIS*. Pembeli semakin diuntungkan karena alternatif pembayarannya semakin beragam. Masyarakat menggunakan aplikasi pembayaran apapun yang sudah mendapat izin di Indonesia dalam melakukan transaksi. Di samping itu, transaksinya mudah karena tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Pembayaran dapat dilakukan dalam jumlah nominal dengan pas sehingga tidak perlu menunggu uang kembalian.

Dalam proses sosialisasi penggunaan *QRIS* bagi pelaku UMK terkadang menemui kendala. Pengalaman Tim ISEI Cabang Yogyakarta bekerjasama dengan BI DIY dan Bank BPD DIY pada tahun 2021 menemukan kendala tersebut. Pada waktu itu, tim mencoba mengajak 250 pedagang skala mikro untuk menggunakan *QRIS* dalam transaksi mereka. Kendala yang ditemui pada umumnya belum mempunyai rekening bank dan belum mempunyai *smartphone*.

Sosialisasi harus dilakukan cukup intensif, sekaligus diberi iming-iming atau insentif pembukaan rekening bank dengan gratis dan sejumlah sembako. Dengan iming-iming dan pendampingan akhirnya mayoritas menggunakan *QRIS*. Dalam perjalanan waktu, ternyata tidak semua tertib menggunakan *QRIS* dalam setiap transaksinya. Sebagian dari pedagang mikro tersebut, “menyembunyikan” tanda *QRIS*. Alasan mereka adalah lebih memilih transaksi secara *cash*, karena uang yang diperoleh segera dapat digunakan transaksi dengan pemasok.

Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena penggunaan *QRIS* memerlukan transisi untuk adaptasi bagi pelaku UMK. Mengacu data perkembangan jumlah merchant yang menunjukkan tren meningkat, maka diharapkan pelaku UMK yang menggunakan *QRIS* juga meningkat. Sebagai daerah tujuan wisata, sebagian besar wisatawan juga pengguna *QRIS* maka penggunaan *QRIS* bagi pelaku UMK merupakan tuntutan yang sulit dihindari.

DIY atau Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata budaya dan kota pendidikan yang “istimewa”, sudah sewajarnya seluruh pemangku kepentingan mendukung penggunaan *QRIS* dalam setiap transaksi. Dengan laju perkembangan penggunaan *QRIS* yang terus meningkat maka “Jogja QRIS^{istimewa}” dapat menjadi sebutan baru bagi Yogyakarta. Sebutan yang penulis adaptasi atau pinjam dari Ibrahim (Kepala Perwakilan BI DIY). Salam “Jogja QRIS^{istimewa}”!

allobank

MENGUCAPKAN

SELAMAT & SUKSES

ATAS TERBITNYA

WARTA ISEI VOL. 1 NO. 1, JUNI 2024

Experience A Simple Life

Nikmati fitur solusi finansial yang membantu kehidupan kamu jadi lebih simple



#UntungAdaAlloBank



PT Allo Bank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh OJK • Peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Menggali Potensi Lokal, Menjadi Peluang Bisnis

Oleh **Dr. Reniati, S.E., M.Si.**

Ketua ISEI Cabang Pangkal Pinang &
KAPRODI MM FEB Universitas Bangka Belitung



Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, termasuk jenis tanam-tanaman herbal dan rempah-rempah. Akan tetapi, minimnya pengetahuan Masyarakat sehingga hanya sebagian kecil saja yang mengetahui adanya potensi pangan lokal tersebut. Jenis-jenis tanaman herbal tersebut diketahui memiliki banyak manfaat bagi Kesehatan dan memiliki zat anti oksidan yang dapat dibuat dalam bentuk minuman fungsional. Minuman fungsional merupakan minuman yang apabila dikonsumsi dapat memberikan pengaruh positif terhadap Kesehatan tubuh, sebab mengandung unsur-unsur zat gizi atau non gizi. Pada saat wabah pandemi *COVID-19* menyapa Indonesia, mulailah Masyarakat peduli dengan kekayaan Indonesia ini.

Pembelajaran penting setelah pandemi *COVID-19* mewabah di seluruh penjuru dunia, ada 2 hal yang penting bagi kita yaitu kemandirian ekonomi dan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kemandirian ekonomi menjadikan suatu bangsa akan tetap berdiri kokoh dan tidak bergantung kepada negara lain, walaupun ada suatu kejadian yang memaksa untuk mencukupi kebutuhan dari internal. Pandemi memaksa kita untuk menggali potensi pangan lokal yang ada disekitar kita karena terhentinya mobilitas manusia dan transportasi yang membawa logistik dari satu negara ke negara lain.

Selain itu, Masyarakat semakin *aware* terhadap Kesehatan, pepatah Latin yang menyatakan *Men Sana In Corpore Sano* yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, betul-betul kita rasakan pada saat pandemi. Sampai hari ini motto itu yang menjadi perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih produk yang berdampak kepada kesehatan, karena ini lebih penting dari segalanya.

Dua hal ini lah yang menjadi awal pemikiran Dr. Reniati, SE.,M.Si. selaku Ketua ISEI Cabang Pangkalpinang Koordinator Bangka Belitung untuk memulai bisnisnya dengan menggali rempah-rempah lokal dan fokus kepada produk yang dibutuhkan oleh konsumen yaitu produk minuman herbal dengan merk Dejamu Melayu. Dejamu Melayu yang memiliki tagline Dijaga Dirimu, Cara Enak Minum Jamu. Awal usahanya hanya memiliki 5 varians yaitu Rerona (Rempah No Corona), Kuas (Kunyit Asem), Berancur (Beras Kencur), Sejuk (Serai Jeruk) dan Sejarah (Serai Jahe Merah). Usaha ini mulai dirintis tepat pada saat pandemi *COVID-19* mulai merebak seantero Nusantara tepatnya di bulan Maret 2019.

Saat ini tepat 5 tahun usia Dejamu Melayu dan telah bermatomorfosis menjadi 17 varian sesuai permintaan konsumen yang memiliki banyak kebutuhan untuk Kesehatan dan kebugaran tubuh. Varians yang ada saat ini adalah : 7 Rempah, Sejuk (Serai Jeruk), Kumanja (Kunyit Manjakani), Jejak Manismu (Jeruk, Jahe, Kayu Manis dan Madu), Bersemi (Bersih Sehat Rahim Ibu), Tamarin, *Pure Orange*, Kupuja (Kunyit Putih Jahe), *Ginger Latte*, dan *Tumeric Latte*.

Dua varian terakhir ditujukan untuk segmen pasar generasi Z dan milenial yang menginginkan rasa jamu lebih *soft* dan juga tampilan warnanya menarik, sehingga *Ginger Latte* dan *Tumeric Latte* menjadi varian yang juga *best seller*. Untuk ukuran botolnya juga dibuat bervariasi mulai dari ukuran 100 ml, 250 ml, 500 ml dan 1000 ml.



Untuk menumbuhkan ekonomi lokal, Dr. Reniati, sengaja menggunakan 100 persen bahan baku rempah-rempahnya dari para petani yang ada di Bangka-Belitung. Pernah, juga dicoba menggunakan bahan baku dari luar Bangka, ternyata hasilnya berbeda. Rempah yang berasal dari Bangka Belitung lebih nendang rasanya dibandingkan dari luar Bangka Belitung.

Hal ini ternyata terkonfirmasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Resky Ryadha *et al*, 2021), artikel yang berjudul Potensi Rempah-Rempah sebagai Minuman Fungsional Sumber Antioksidan dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. Untuk pengemasan juga dibuat sedemikian rupa supaya menarik, aman dan higienis serta bisa diminum kapanpun dengan tetap menjaga rasanya yaitu ditempatkan di *showcase* atau lemari es.

Di tahun kelima keberadaan Dejamu Melayu, telah menjadi minuman semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja dan orang dewasa bahkan orang tua. Segmen pasarnya juga meluas dari mulai kalangan bawah, dan terutama lebih fokus ke konsumen kelas menengah maupun atas. Ini karena rasanya yang terasa kuat dan juga manfaat dari minum Dejamu melayu yang dirasakan oleh para konsumennya. Bahkan Dejamu Melayu, menjadi *welcome drink* untuk tamu-tamu yang hadir ke Bumi Serumpun Sebalai, salah satu pelanggan tetapnya adalah di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Para tamu yang datang dari berbagai penjuru negeri dan dari Luar Negeri seperti Jepang, Malaysia, Palestina, Suriah, Thailand dan Mesir sudah mencicipi khasiat minuman perpaduan resep dari Jawa-Melayu (Bangka) ini. Ternyata Dejamu Melayu diakui sebagai minuman yang bisa mencairkan suasana, memperlancar negosiasi dan mempererat silaturahmi dan komunikasi.

Harapannya ke depan, Dejamu Melayu semoga menjadi salah satu Solusi untuk Kesehatan dan juga menambah pendapatan serta lapangan pekerjaan.

Dejamu Melayu yang merupakan perpaduan antara racikan jamu dari Jawa dan bahan baku dari Bangka, diharapkan memberikan alternatif bisnis minuman herbal selain dari tambang timah. Sudah saatnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, mulai melakukan transformasi strategi Pembangunan ekonominya dengan meningkatkan inovasi teknologi untuk mengolah bahan baku yang mereka miliki sehingga memiliki *value added* yang lebih berkualitas dan perekonomian daerah mampu berdaya saing serta berkelanjutan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan serampangan akan berdampak seperti saat ini, dimana salah satunya sumber daya alam timah menjadi polemik yang berkepanjangan setelah penangkapan besar-besaran oleh Kejagung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengakibatkan kerugian mega korupsi sebesar 271 Triliun, ini belum termasuk kerugian negara seperti dari pemasukan pajak dan lain-lain.

Mari kita gali potensi lokal menjadi peluang bisnis sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru untuk meningkatkan inklusi ekonomi daerah. Jangan sampai fenomena kutukan Sumber Daya alam (*Natural Resource Curse*) menjadi fenomena yang *paradox of plenty* yang sudah mahfum di negara-negara berkembang yang kaya sumberdaya alam, termasuk di Indonesia. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, ternyata kekayaan sumber daya alam bisa memicu konflik di karena ketimpangan di masyarakat (Stiglitz, 2007) dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam oleh kelompok kecil politik untuk menguatkan kekuatan politik di daerah (Acemoglu, *et al* 2004), dan seterusnya . Sebagai akademisi dan juga Ketua ISEI, Dr. Reniati, SE.,M.Si. berusaha mengimplementasikan ilmunya dalam bentuk penelitian dan pengabdian Masyarakat yang berpihak kepada para pelaku ekonomi kerakyatan yaitu UMKM. Hal ini dikarenakan lapangan usaha yang dalam skala UMKM sering mengalami kerentanan dalam situasi ekonomi yang penuh dengan *Uncertainty* yang tinggi seperti ekonomi global yang belum pulih serta perekonomian nasional yang tetap optimis tetapi masih harus diwaspadai.

Nudge Theory: Memanusiawikan Kembali Pengambilan Keputusan Ekonomi

Oleh Yohanes Berenika Kadarusman, Ph.D.

Pengurus Pusat ISEI Bidang III & Dosen Universitas Prasetiya Mulya



Pada tahun 2017, Richard Thaler menerima anugrah Nobel untuk bidang ilmu ekonomi karena kontribusinya dalam menyatukan kembali ilmu ekonomi dengan ilmu sosial lainnya khususnya psikologi dalam memahami pengambilan keputusan ekonomi yang lebih realistis. Penyatuan ilmu ekonomi dan ilmu psikologi menjadi pondasi cabang ilmu perilaku ekonomi (*Behavior Economics*). Dalam ilmu perilaku ekonomi diakui bahwa keputusan individu didasarkan pada sifat yang terkadang jauh dari rasional. Ilmu ekonomi (mikro) mengajarkan bahwa pengambilan keputusan individu diasumsikan selalu rasional (*homo economicus*) dengan membandingkan antara manfaat dan biaya. Dengan demikian keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa ditentukan oleh kepuasan maksimum dari konsumsi barang dan jasa tersebut (*utility maximization*) dan keputusan produsen untuk menjual barang dan jasa ditentukan oleh laba maksimum (*profit maximization*). Namun demikian dalam kenyataannya keputusan individu tidak selalu rasional sehingga hasilnya menjadi tidak optimal.

Keputusan individu yang tidak selalu rasional sudah diprediksikan oleh ilmu psikologi terutama yang berfokus pada kognitif manusia (*cognitive approach*) dimana kognitif atau pola pikir manusia tidak hanya bersifat rasional tetapi juga emosional.

Dalam buku *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness* (2008) yang ditulis Thaler bersama Sunstein, kognitif manusia dibedakan menjadi 2 sistem: *reflective system* dan *automatic system* (serupa dengan *system 2* dan *system 1 thinking* yang dicetuskan oleh Daniel Kahneman yang juga seorang penerima Nobel bidang ilmu ekonomi di tahun 2002). *Reflective system* merupakan pengambilan keputusan yang rasional dimana manusia mengambil keputusan secara sadar bersifat otomatis dan emosional. Dengan demikian keputusan individu tergantung pada sistem kognitif yang digunakan, implikasinya keputusan seseorang tidak selalu rasional seperti halnya asumsi di ilmu ekonomi. Pengambilan keputusan yang tidak selalu rasional dan terkadang salah sebenarnya merupakan sifat alamiah manusia yang sejatinya cerdas dan bijaksana (*homo sapiens*). Dengan demikian pengambilan keputusan *homo sapiens* merupakan kombinasi kedua sistem kognitif.

Menyadari adanya dua sistem kognitif yang menentukan pengambilan keputusan individu, maka memungkinkan pengambilan keputusan untuk diarahkan dengan memberikan sugesti atau menyentuh (*nudge*) baik *reflective system* maupun *automatic system* untuk menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien. Berbeda dengan ilmu ekonomi yang lebih fokus pada *reflective system* dalam mengarahkan pengambilan keputusan dan perilaku individu, ilmu perilaku ekonomi mencoba untuk menyentuh *automatic system* agar pengambilan Keputusan bersifat tanpa sadar dan otomatis. Dengan demikian efektivitas sebuah kebijakan ekonomi tidak harus selalu disertai (dis)insentif finansial yang mempengaruhi manfaat dan biaya yang dasar pengambilan keputusan individu. Dalam bukunya Thaler dan Sunstein mencontohkan cukup dengan mengubah desain arsitektur pilihan (*choice architecture*) akan mengarahkan keputusan individu yang lebih optimal. Dalam bukunya, Thaler dan Sunstein mencontohkan bagaimana rendahnya individu dalam berpartisipasi dalam program dana pensiun dan donor organ tubuh di Amerika. Hal tersebut karena kebijakan dan program pemerintah tersebut selama ini bawaannya (*default*) *opt-in*; artinya jika individu memilih untuk ikut program tersebut maka diharuskan mengisi formulir.

Secara otomatis, tanpa mengisi formulir artinya individu memilih untuk tidak ikut (*opt-out*). Masalahnya, Sebagian besar individu malas untuk mengisi formulir, sehingga hasilnya adalah sedikit individu yang mau ikut dan berpartisipasi dalam program pensiun maupun donor organ. Untuk dapat meningkatkan keikutsertaan individu dalam program tersebut, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah desain bawaan dari program tersebut dari *opt-in* menjadi *opt-out*; artinya jika individu tidak mengisi formulir maka individu memilih ikut program. Dengan demikian jika individu tidak mau ikut, maka harus mengisi formulir. Karena biasanya individu malas dalam mengisi formulir, maka hasilnya semakin banyak individu yang ikut program. Pemerintah tidak perlu menawarkan insentif finansial untuk mendorong keikutsertaan individu dalam program tersebut.



Contoh aplikasi lainnya adalah adanya gambar lalat kecil di peturasan laki-laki. Gambar lalat tersebut didesain untuk menyentuh *automatic system* pengguna untuk bertindak refleksi mengarahkan pipisnya tepat mengenai lalat. Tujuannya agar mengurangi cipratan pipis ke lantai yang harus dibersihkan secara rutin. Hasilnya biaya pembersihan kamar kecil menjadi berkurang. Bisa saja pengelola kamar kecil menyewa petugas yang memantau pengguna dan memberikan denda jika kedapatan pipisnya menciprati lantai. Namun demikian kebijakan ini akan mahal dan melanggar privasi pengguna kamar kecil.

Berdasarkan beberapa studi yang dilakukan menunjukkan bahwa perilaku hemat listrik tidak hanya dipengaruhi oleh berupa disinsentif ekonomi berupa tarif dasar listrik yang tinggi, tetapi juga faktor emosional berupa sifat optimistis individu terhadap lingkungan. Sifat optimistis terhadap lingkungan berpengaruh positif terhadap keputusan berhemat listrik. Individu yang merasa optimis akan masa depan lingkungan yang lebih baik dan percaya dapat berkontribusi pada perbaikannya (*pro-environmental behavior*), maka individu tersebut akan termotivasi untuk berhemat listrik.

Faktor disinsentif ekonomi berupa tarif tinggi hanya berpengaruh positif terhadap keputusan berhemat listrik untuk kelompok individu yang sensitif terhadap tarif (*price sensitive*) dimana keputusan berhemat listrik ditujukan untuk mengurangi pembayaran tagihan listrik. Saat individu tidak lagi sensitif maka keputusan berhemat listrik menjadi menurun. Dengan demikian kebijakan dan program hemat listrik dengan menggunakan instrumen disinsentif ekonomi hanya efektif sampai batas tertentu dengan menyentuh sifat rasional individu. Sifat emosional individu seperti optimistis terhadap lingkungan menjadi pertimbangan bagi individu yang tidak sensitif terhadap disinsentif ekonomi.

Teori *Nudge* dan perilaku ekonomi lainnya dapat memperkaya pemahaman terhadap pengambilan keputusan oleh individu. Penyatuan kognitif manusia dan perilaku ekonomi dapat membantu menjawab permasalahan ekonomi dengan lebih baik. Efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program ekonomi lebih dapat ditingkatkan tidak hanya dengan menyentuh sifat rasional tetapi juga sifat emosional individu.

Menghadapi Tantangan Inflasi 2024: Mengoptimalkan Peran ISEI Cabang

Oleh **Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP., M.Si.**

Pengurus Pusat ISEI Bidang III & Guru Besar FEM

Institut Pertanian Bogor University



Belum lama di awal tahun 2024, kita dihebohkan dengan naiknya harga serta sulitnya masyarakat mendapatkan beras di pasar. Selain dampak dari penurunan produksi akibat gangguan cuaca, secara bersamaan ada peningkatan permintaan karena hajat demokrasi nasional dan daerah. Kejadian ini tentunya harus dicegah berulang. Beras sebagai sumber karbohidrat masyarakat Indonesia masih termasuk penyumbang inflasi terbesar, khususnya *volatile food*, karena tingkat konsumsi yang tinggi baik di perdesaan maupun perkotaan.

Selain beras, komponen penyumbang inflasi di tanah air datang dari berbagai komoditas yang sulit disubstitusi dengan komoditas lain. Berbagai kuliner Nusantara menyaratkan penggunaan berbagai jenis sayuran yang memberikan cita rasa khas di lidah. Bawang merah dan cabai merah yang sebenarnya sudah dapat diproduksi dengan baik dalam negeri masih mengalami fluktuasi produksi sehingga ketersediaan di pasar konsumen dapat berubah signifikan, berujung pada kenaikan harga yang mencapai lebih dari 3 kali lipat daripada situasi normal. Berbagai produk peternakan seperti telur dan daging ayam juga dapat naik tanpa dapat diprediksi, disebabkan hambatan dalam penyediaan input di sektor hulu.

Tentu beragam komoditas pangan lain mempunyai fenomena yang berbeda, namun secara umum harganya masih menunjukkan adanya variasi antar waktu dan juga antar wilayah yang tajam.

Hasil riset kerjasama FEM IPB dengan Bank Indonesia menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara cadangan pangan dengan pengendalian harga. Simulasi memberikan kesimpulan dampak yang signifikan dari penambahan stok terhadap penurunan harga. Dengan demikian, untuk mengurangi inflasi karena *volatile food*, baik secara nasional dan tentunya di setiap daerah harua tersedia cadangan pangan yang cukup, baik pangan yang mempunyai daya simpan lama seperti beras, jagung, gula pasir juga pangan yang mudah rusak seperti sayuran dan berbagai produk peternakan.

Selama ini pemerintah daerah di bawah koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu dan Bank Indonesia) sudah diarahkan untuk melakukan pengendalian inflasi melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Di tingkat pusat, tim telah menetapkan peta jalan dan strategi pengendalian inflasi. Diharapkan setiap daerah mengupayakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Keempat hal ini dapat dicapai antara lain dengan perbaikan kelembagaan, akses pembiayaan, dan inovasi teknologi di sisi produksi; digitalisasi sistem distribusi serta mendorong kerjasama antar daerah sehingga cadangan pangan lebih merata.

Dalam pelaksanaan program TPID, diharapkan adanya peran banyak pihak: pentaheliks. Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi pimpinan daerah harus bersama-sama dengan pihak swasta, koperasi dan masyarakat, media serta perguruan tinggi baik yang ada di daerah atau pun dari luar, untuk menyusun program yang dapat memecahkan akar persoalan inflasi yang terjadi. Dalam hal ini berbagai inovasi menjadi penting, mulai dari sisi hulu atau hilir dan di sepanjang rantai pasok, karena dinamika fenomena yang terjadi menyebabkan pemicu inflasi juga berubah.

Selama ini Presiden setiap tahun memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang mampu membuat program tersebut dengan baik, sehingga dapat menjadi praktik baik bagi daerah lainnya. Anggota ISEI Cabang yang tersebar mulai dari profesional di dunia swasta, media, akademisi, peneliti serta di institusi pemerintah, dapat memberikan dukungan untuk perancangan dan pelaksanaan program. Ketidakpastian akibat perubahan iklim dan situasi geopolitik memerlukan berbagai terobosan sehingga dapat mengatasi persoalan-persoalan baru.

Ini menghendaki inovasi seperti efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan input produksi, inisiatif baru dalam pengelolaan titik kritis rantai pasok, perpanjangan daya simpan produk pangan, termasuk juga skema pembiayaan seperti *supply chain financing*. ISEI Cabang melalui kegiatan kerjasama riset, *FGD* dan seminar dapat memberikan masukan bagi TPID setempat.

Potensi Pariwisata Untuk Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara

Oleh **Joy Elly Tulung, Ph.D.**

Ketua ISEI Cabang Manado & Dosen FEB Universitas Sam Ratulangi

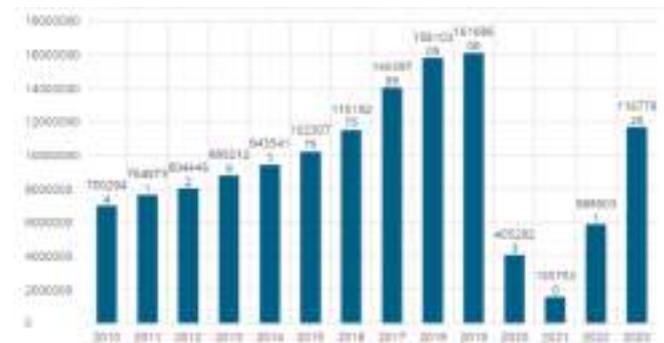


Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki banyak keberagaman mulai dari kebudayaan, keindahan alam, hingga variasi bahasanya. Keberagaman yang ada tersebut menjadi daya tarik pariwisata tidak hanya bagi masyarakat lokal namun juga mancanegara. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju memiliki makna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di waktu yang akan datang harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan.

Pemanfaatan teknologi tersebut harus turut mempertimbangkan aspek kemampuan industri dalam mengadopsinya juga aspek permintaan wisatawan. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu melakukan penyesuaian pada perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dunia, agar tidak tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berdaya saing berarti bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain.

Begitu pula dalam sektor pariwisata, Indonesia diharapkan mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga (Koleangan et al, 2023).

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor pariwisata adalah salah satu sumber pendapatan devisa yang sangat potensial, menurut data dari KEMENPAREKRAF RI pada tahun 2020 sektor pariwisata memberikan kontribusi sekitar 4,1% pada PDB menurun dari 4.8% pada tahun 2019, dan itu lebih disebabkan karena Pandemi COVID-19, serta menyerap 13 juta tenaga kerja atau 10.28% tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya agar supaya kontribusi tersebut terus meningkat, dan dalam mendukung peningkatan kontribusi tersebut, diperlukan juga peningkatan kualitas dan jumlah wisatawan.



Grafik di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2019 wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan dari 7.002.944 menjadi 16.108.600 pada tahun 2019 dan akhirnya menurun drastis tinggal menjadi 4.052.923 pada tahun 2020 dan bahkan terus menurun menjadi hanya 1.557.530 pada tahun 2021 penurunan drastis tersebut terjadi karena Pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial yang membuat aktivitas pariwisata menjadi lumpuh. Setelah itu tahun 2022 dan 2023 kembali mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi serta berakhirnya COVID-19 dan dibukanya kembali pintu pariwisata.

Sejak tahun 2015, pendapatan devisa dari sektor pariwisata berada di urutan keempat setelah sektor minyak dan gas, batubara dan kelapa sawit (Luthfia, 2021). Dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, terjadi peningkatan konsumsi oleh wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Total konsumsi pariwisata internal tahun 2019 mencapai 1.734 triliun rupiah meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 1.259 triliun rupiah, dimana secara rata-rata naik sebesar 37,7%. Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di tahun 2019, diketahui nilai konsumsi pariwisata internal yang terdiri dari pengeluaran wisatawan domestik sebesar 1.455 triliun rupiah (83,91%) dan pengeluaran pariwisata mancanegara sebesar 279 triliun rupiah (16,09%).

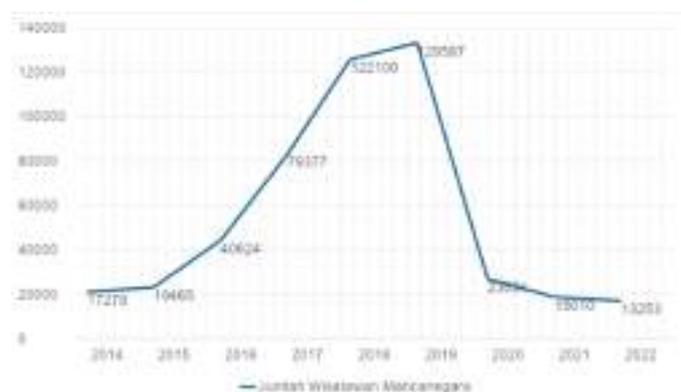
Menurut data KEMENPAREKRAF RI tahun 2020 sebanyak 10.946 usaha pada sektor pariwisata telah terdampak dan 30.421 tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, menurut BPS, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia pada bulan Desember 2020 mencapai rata-rata 40,79 persen atau turun 18,60 poin dibandingkan TPK bulan Desember 2019 yang mencapai 59,39 persen. Kemenparekraf menargetkan jumlah wisatawan mancanegara meningkat dari 2,8 – 4,0 Juta Wisatawan di tahun 2020 menjadi 16 – 17 Juta Wisatawan di tahun 2024. Bahkan pada bulan Maret 2021 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang baru dilantik akhir Desember 2020 Sandiaga Uno langsung melakukan pengecekan ke Likupang. Saat ini yang sedang dikembangkan adalah Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang, Minahasa Utara di Sulawesi Utara dan DSP Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Widarsi, 2019).

Seperti juga secara nasional yang mengalami penurunan dikarenakan Pandemi COVID-19, jumlah Wisatawan Mancanegara yang ke Sulawesi Utara hingga Desember 2020 secara kumulatif mencapai 23.031 orang. Angka ini menurun dibandingkan jumlah wisatawan mancanegara secara kumulatif pada bulan Desember di Tahun 2019 yaitu 129.587 Orang. Oleh karena itu Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi bersinergitas untuk melakukan pembangunan infrastruktur agar supaya bisa menunjang KEK Pariwisata Likupang dan juga DSP Likupang.

Kegiatan pariwisata sangat diharapkan dapat membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal dan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar yang tentunya akan data meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara.

Kreativitas masyarakat tentunya akan meningkat dan diharapkan UMKM akan naik kelas dengan berdasarkan kreativitas lokal. Selain itu, pariwisata juga tentunya akan memperkenalkan identitas dan kebudayaan lokal maupun nasional kepada wisatawan mancanegara dan nusantara. Pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan devisa tentunya akan meningkatkan perannya dalam perekonomian Indonesia.

Pariwisata berbasis alam masih merupakan daya tarik utama di Sulawesi Utara. Selain itu Sulawesi Utara juga terkenal dengan kerukunan antar umat beragama yang begitu erat. Banyak tempat-tempat wisata lainnya yang tersebar di Sulawesi Utara diantaranya yang tidak asing lagi kita dengar bahkan sampai ke luar negeri yaitu keindahan Taman Laut Bunaken sebagai marine tourism kelas dunia icon pariwisata kota Manado, ada juga destinasi unggulan yaitu Danau linow, Danau cantik yang memancarkan keindahan 3 warna. Berjarak 30 Km dari kota Manado.



Grafik di atas menunjukkan statistik kedatangan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara dari tahun 2014 ke tahun 2022, dimana grafik tersebut menunjukkan trend yang terus meningkat namun pada akhirnya di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2021 dan 2022. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2019 merupakan yang tertinggi dalam periode tujuh tahun terakhir, yaitu sebesar 129.587 wisatawan mancanegara. Kerja keras Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sangat berhasil namun sayangnya karena dampak dari COVID-19 membuat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2020 menurun drastis. Adapun peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Sulawesi Utara pada tahun 2019 yaitu sebesar 649,97 persen dari tahun 2014.

Pariwisata Sulawesi Utara yang belum pulih dari pandemi *COVID-19* tentunya dibutuhkan jalan keluar agar supaya pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara bisa berkembang, dan saat ini adalah kesempatan bagi pemerintah daerah agar supaya bisa mempersiapkan diri, setelah semua infrastruktur penunjang pariwisata selesai dibangun dan juga didukung modernisasi infrastruktur teknologi informasi. Kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga-lembaga yang ada seperti Bank Indonesia, OJK dan akademisi, masyarakat serta seluruh pihak terkait diharapkan bisa mengangkat Pariwisata di Sulawesi Utara apalagi dengan adanya KEK Pariwisata Likupang dan juga ditetapkannya Likupang menjadi Destinasi Super Prioritas.

Kebaya dan Kain Batik Sebagai Pengingat Budaya Di Banyuwangi

Oleh **Anggie Amanda, S.Sos., M.Si.**

Sekretaris Rektor & Kepala HUMAS Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



Kebaya dan batik adalah jendela yang membawa kita melihat keindahan budaya dan warisan Indonesia. Kebaya adalah simbol keanggunan, sedangkan batik adalah cermin dari perjalanan sejarah. Keduanya mengungkapkan keindahan yang tak terhingga. Kebaya dan batik adalah dua elemen yang sangat penting dalam budaya Indonesia. Bagian integral dari warisan budaya. Kerap disebut sebagai simbol identitas nasional. Di Kabupaten Banyuwangi pesona kebaya dan kecantikan batik menjadi pengingat akar budaya.

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, adalah salah satu kabupaten yang konsisten mempopulerkan kebaya daerah dalam berbagai kesempatan. Kebaya Banyuwangi, identik dengan Baju Adat Osing dengan atasan kebaya berwarna hitam dipadupadankan dengan kain Batik Banyuwangi. Osing adalah suku asli Banyuwangi sejak era Kerajaan Blambangan. Suku Osing hingga saat ini masih mempertahankan dan melestarikan akar budaya Banyuwangi, salah satunya melalui pakaian adat.

Sejak 06 Oktober 2016, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memberlakukan aturan penggunaan Pakaian Adat Osing sebagai Pakaian Dinas Harian (PDH).

Kebijakan ini berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 27 Tahun 2016, tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kabupaten Banyuwangi. Perbup itu ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) dari Sekretaris Daerah Nomor 065/236/429.013/2016 tentang Penggunaan Pakaian Adat Banyuwangi sebagai Pakaian Dinas Harian (PDH).



Bisa dipastikan sejak tahun 2016 hingga kini, pengrajin kebaya dan batik Banyuwangi mendapatkan peningkatan penjualan, karena kebutuhan Pakaian Adat Banyuwangi terus meningkat tidak hanya di kalangan ASN atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetapi juga masyarakat Banyuwangi. Seperti kita ketahui, Banyuwangi juga dikenal sebagai Kota Festival. Puluhan Festival mewarnai agenda kegiatan Kabupaten Banyuwangi dalam setahun. Kegiatan tersebut juga kerap diwarnai dengan penggunaan Dress Code (DC), Pakaian Adat Banyuwangi termasuk Kebaya (bagi wanita). Inilah yang membuat Festival di Kabupaten Banyuwangi menjadi istimewa, karena selalu selaras dengan akar budaya daerah.

Dukungan untuk melestarikan kebaya sebagai pengingat budaya Indonesia juga dilakukan di lingkungan Kampus atau Perguruan Tinggi. Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi menjadi pelopor penggunaan kebaya nasional sebagai pakaian dinas harian (pdh) di lingkungan kampus di Banyuwangi. Hal ini terinspirasi dari gerakan yang dilakukan oleh Komunitas Perempuan Berkebaya (KPB) dan Kampanye Kebaya Goes to UNESCO.

Pada pertengahan tahun 2019, KPB mulai mengajak orang-orang untuk ikut rutin berkebaya dalam sebuah gerakan yaitu Selasa Berkebaya yang digaungkan kepada masyarakat. Gerakan ini diperkuat dengan hadirnya kampanye dukungan Kebaya Goes to UNESCO, agar kebaya dapat diakui menjadi warisan budaya tak benda asal Indonesia di mata dunia. Terinspirasi dari gerakan tersebut, Untag Banyuwangi menggelar Untag Banyuwangi Bangga Berkebaya yang di *launching* pada 09 September 2022. Kegiatan ini memiliki berbagai program edukasi dan sosialisasi tentang Kebaya melalui *talkshow* dengan narasumber kompeten yang dapat menyajikan informasi menarik tentang kebaya. Selain itu, kampus merah putih ini meresmikan Selasa Berkebaya dengan menetapkan kebaya sebagai pakaian dinas harian (PDH) bagi wanita yang dikenakan setiap hari Selasa.



Menggunakan kebaya dalam berbagai situasi, bukan hal yang asing di masa kini. Komunitas perempuan dari berbagai wilayah dan beragam kalangan, ikut menggaungkan indahnya berkebaya agar kebaya tetap dikenal sebagai busana budaya Indonesia. Di Kabupaten Banyuwangi juga terdapat Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia (KKI) Banyuwangi.

Sukanti Swantikawati, S.H.,M.M. – Ketua Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia (KKI) Banyuwangi mengatakan KKI Banyuwangi sejak tahun 2020 turut melestarikan kain dan kebaya di Kabupaten Banyuwangi dan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan program dan kegiatannya. Saat ini, KKI Banyuwangi menjadi wadah para perempuan untuk saling memotivasi bahwa berkebaya adalah seni budaya yang harus dilestarikan. Sekitar 150 anggota dari berbagai kalangan perempuan telah menjadi bagian dari KKI Banyuwangi. Dalam setiap kesempatan, para perempuan KKI selalu berkebaya dan berkain agar kebaya tetap berdaya dan berbudaya.

Tidak hanya kebaya, kain batik juga memiliki tempat tersendiri sebagai sebuah seni yang menjadi media ekspresi. Batik adalah sebuah warisan budaya yang sangat berharga. Setiap tahun, Indonesia merayakan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya ini. Sejarah Hari Batik Nasional dimulai dari pengakuan batik sebagai warisan budaya takbenda oleh UNESCO pada tahun 2009. Hari Batik Nasional bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga menjadi cara untuk menjaga identitas bangsa Indonesia dan memperkuat persatuan.

Bicara tentang Batik, Banyuwangi tidak hanya memiliki kekayaan alam dan pariwisata, tetapi juga punya batik khas daerah. Batik Gajah Oling, Kangkung Setingkes, Paras Gempal, Kopi Pecah, Manuk Kekaruk, Sembruk Cacing, Gedekan, adalah beberapa dari puluhan motif batik yang ada di Banyuwangi yang didominasi menggambarkan flora dan fauna. Semua motif Batik memiliki makna. Motif batik tertua yang ada di Bumi Blambangan ini adalah Gajah Oling. Motif batik Gajah Oling ini sudah go internasional. Motif ini menjadi simbol masyarakat Banyuwangi. Kata 'Gajah' artinya sesuatu yang besar, dan 'Oling' memiliki maksud mengingatkan. Dengan kata lain, makna dari Batik Gajah Oling adalah mengingatkan kepada Yang Maha Besar.



Sejak kepemimpinan Bupati Banyuwangi – H. Abdullah Azwar Anas, M.Si. tepatnya pada peringatan Hari Jadi Banyuwangi ke-241 tahun 2012, Batik Banyuwangi menjadi pakaian yang harus dikenakan oleh seluruh pegawai, dan para guru selama bulan Desember. Kebijakan tersebut terkait dengan Hari Jadi Banyuwangi (HARJABA) yang diperingati setiap tanggal 18 Desember, dan berlangsung hingga saat ini. Untuk mempromosikan dan mempopulerkan Batik Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menggelar Banyuwangi Batik Festival (BBF) sebagai salah satu agenda dalam rangkaian Banyuwangi Festival (B-Fest).

BBF telah memasuki satu dekade (10 tahun) dalam pergelarannya. Acara ini digelar sebagai bentuk konsistensi Pemkab Banyuwangi dalam mengembangkan ekosistem batik lokal Banyuwangi. Banyuwangi sendiri memiliki 44 motif batik yang setiap tahunnya secara bergantian diangkat menjadi tema BFF. Berkat konsistensi tersebut kini industri dan gerai batik terus tumbuh, paralel dengan banyaknya desainer-desainer muda yang bermunculan. Tidak hanya itu, motif batik Banyuwangi juga terus berkembang dan dieksplorasi dari kekayaan potensi yang dimiliki Banyuwangi, tanpa meninggalkan akar budaya Batik Banyuwangi.

Pelaksanaan BFF ini juga mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan skill dan kapasitas para pelaku UMKM Batik Banyuwangi. Tidak hanya memproduksi batik, namun dari produksi hingga menjadi pakaian jadi. Sebuah hilirisasi pengembangan batik yang menjadi pencapaian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Satu dekade BFF, memotivasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar berbagai pelatihan dan mendatangkan pelaku industri batik nasional, desainer nasional, untuk sharing dan diskusi sekaligus mendampingi pelaku UMKM Batik Banyuwangi. Hal ini membuat ekosistem mulai tumbuh, pelaku UMKM yang awalnya balasan kini telah menjadi 60 pelaku usaha batik di Banyuwangi.

Seiring dengan perkembangan pariwisata Banyuwangi yang kian mempesona, Batik Banyuwangi juga turut menjadi idola. Motifnya yang khas, warnanya yang menarik, menjadi alasan bahwa Batik Banyuwangi selalu memiliki daya tarik tersendiri. Keragaman motif batik Banyuwangi ini makin menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia.

“Kebaya dan batik bukan sekadar fesyen, melainkan warisan budaya yang harus terus dilestarikan.”

Merajut Pemahaman Kecanduan: *Neuroeconomics* Dalam Pertarungan Antara Kepuasan Instan dan Manfaat Jangka Panjang

Oleh **Mario Rosario Wisnu Aji, S.E., M.Ec.Dev.**

Dosen FBE Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dalam labirin kompleksitas perilaku manusia, kecanduan menonjol sebagai salah satu fenomena yang paling membingungkan dan merusak, mencengkeram jutaan orang di seluruh dunia dengan ikatan yang tampaknya tidak terputus. Untuk memahaminya, dapat digunakan sudut pandang ilmu pengetahuan yang relatif baru namun menjanjikan, yaitu *neuroeconomics*. Bidang ilmu ini akan membantu mempertemukan sudut pandang ekonomi, psikologi, dan *neurosains* untuk membuka misteri di balik keputusan yang mengarah pada perilaku kecanduan utamanya secara mekanisme kerja otak. Dalam konteks kecanduan, *neuroeconomics* menawarkan wawasan berharga tentang mekanisme otak yang mendasari perilaku kecanduan dan bagaimana keputusan dibuat di tengah konflik antara kepuasan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Harapannya, dengan sudut pandang baru tersebut manusia dapat menggunakan persimpangan multidisipliner ini tidak hanya untuk menelusuri bagaimana kecanduan terbentuk tetapi juga bagaimana kita dapat menggunakannya untuk membentuk strategi intervensi yang lebih efektif dan pendekatan pencegahan yang inovatif.

Akrasia

Perilaku adiktif atau kecanduan, baik itu terkait dengan substansi seperti alkohol dan narkoba atau perilaku seperti judi dan penggunaan internet secara kompulsif, secara tradisional dapat dipandang sebagai kegagalan moral, yakni ketidakmampuan seseorang mematuhi standar perilaku yang mereka anggap benar atau etis. Dalam konteks akademis, "*Akrasia*" merupakan istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada konsep kegagalan moral. *Akrasia* berasal dari bahasa Yunani, yang secara harfiah berarti "kurangnya penguasaan atas diri sendiri" atau "keadaan tanpa kendali," dan digunakan dalam filosofi kuno untuk mendiskusikan ketidaksesuaian antara pengetahuan tentang apa yang benar dengan tindakan yang diambil. *Akrasia*, atau kelemahan kehendak, memainkan peran penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi, yakni menantang asumsi tradisional ekonomi rasional yang menganggap individu selalu membuat keputusan yang memaksimalkan keuntungan mereka. *Akrasia* menjelaskan situasi di mana individu mungkin saja gagal bertindak sesuai dengan penilaian rasional mereka sendiri, atau sering kali menyerah pada godaan jangka pendek yang bertentangan dengan kepentingan jangka panjang mereka. Oleh karena itu pemahaman tentang *akrasia* dan mekanisme untuk mengatasinya sangat penting dalam desain kebijakan dan produk ekonomi yang tidak hanya mengakui kecenderungan irasional manusia tetapi juga berupaya untuk memandu mereka menuju pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih sejalan dengan kepentingan jangka panjang mereka.

Diskon Hiperbolik

Berdasarkan permasalahan tersebut, *neuroeconomics* berkontribusi dalam mengeksplorasi bagaimana otak membuat keputusan ketika dihadapkan pada pilihan yang melibatkan imbalan jangka pendek versus jangka panjang. Konflik antara keinginan jangka pendek dan kepuasan jangka panjang merupakan dilema klasik yang menggarisbawahi sifat manusia.

Di satu sisi, keinginan jangka pendek sering kali bersifat impulsif, mendorong individu untuk mencari kepuasan segera tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Di sisi lain, kepuasan jangka panjang membutuhkan pengorbanan segera untuk manfaat yang lebih besar dan lebih berkelanjutan. Diantara dilema ini, *neuroeconomics* memberikan sudut pandang baru dengan konsep “diskon hiperbolik”, yaitu kecenderungan individu untuk memilih hadiah yang lebih kecil namun segera dibandingkan dengan hadiah yang lebih besar tapi tertunda. Konsep ini sangat relevan untuk menggambarkan konsep kecanduan, di mana kecenderungan untuk memprioritaskan kepuasan jangka pendek di atas manfaat jangka panjang. Penelitian dalam *neuroeconomics* juga turut menunjukkan bahwa otak individu yang mengalami kecanduan menunjukkan aktivitas yang berbeda dalam area yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang nantinya apabila ditelusuri lebih jauh mungkin dapat menjelaskan kesulitan mereka dalam menahan keinginan untuk konsumsi segera. Selain itu, masih terdapat berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan berisiko akibat kecanduan, seperti konteks sosial dan emosional. Misalnya, tekanan sosial atau keadaan emosional negatif dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk membuat pilihan yang secara tidak sadar mengarah pada level kecanduan. Kondisi ini menjadi penting untuk dipahami demi dapat melakukan penelaahan lebih jauh sehingga dapat membantu dalam pengembangan terapi yang ditujukan untuk mengatasi faktor-faktor lingkungan dan emosional yang berkontribusi terhadap perilaku kecanduan.

Dalam aspek yang lebih teknis, konsep diskon hiperbolik tersebut dapat dikatakan mencerminkan pertarungan konstan dalam otak manusia antara sistem limbik, yang mencari kesenangan instan, dengan korteks *prefrontal* yaitu pusat pengambilan keputusan dan perencanaan jangka panjang. Sistem limbik sering dikaitkan dengan fenomena kecanduan karena kemampuannya untuk memproses dan merespon kepuasan atau kesenangan. Ketika seseorang mengalami sesuatu yang menyenangkan, sistem limbik akan merilis *neurotransmitter* seperti dopamin, yang memberikan perasaan senang dan memotivasi perilaku yang akan mencari kesenangan tersebut lagi. Dalam konteks kecanduan, sistem ini dapat menjadi terlalu responsif terhadap rangsangan yang berhubungan dengan substansi atau perilaku adiktif, yang mengakibatkan keinginan yang kuat untuk mengulangi pengalaman tersebut meskipun ada konsekuensi negatif.

Dalam kondisi yang semakin parah, yang perlu dilakukan adalah dengan memodifikasi perilaku kecanduan tersebut dengan kepuasan alternatif atau kegiatan yang kompatibel dengan tujuan jangka panjang, seperti olahraga atau hobi baru, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada hadiah jangka pendek yang diberikan oleh substansi atau perilaku adiktif namun tetap memberikan kesenangan.

Kontribusi *Neuroeconomics*

Pada akhirnya, sampai disini muncul pemahaman baru bahwa *neuroeconomics* menawarkan perspektif berharga dalam memahami dan mengatasi kecanduan. Dengan mengintegrasikan wawasan dari ekonomi, psikologi, dan *neurosains*, disiplin ini mengungkapkan bagaimana keputusan dipengaruhi oleh proses otak dan bagaimana ini dapat berkontribusi terhadap perilaku kecanduan.

Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam memahami dasar neurobiologis dari kecanduan tetapi juga dalam mengembangkan intervensi yang lebih efektif yang dapat menargetkan mekanisme otak yang mendasarinya. Di sisi pencegahan, *neuroeconomics* menawarkan wawasan tentang bagaimana perilaku kecanduan dapat dicegah sejak dini. Pendidikan tentang pengambilan keputusan dan konsekuensi dari kecanduan dapat diperkenalkan di sekolah-sekolah, menggunakan prinsip-prinsip *neuroeconomics* untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya mengontrol dorongan dan membuat pilihan yang mendukung kesejahteraan jangka panjang. Program semacam ini dapat diperkuat dengan pelatihan keterampilan sosial dan emosional yang membantu siswa mengelola tekanan dan emosi yang dapat memicu perilaku kecanduan.

Neuroeconomics juga dapat dikatakan memainkan peran penting dalam mendorong kebijakan publik yang lebih informatif. Dengan memahami dasar-dasar neurobiologis dari kecanduan, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengurangi prevalensi kecanduan dalam masyarakat. Hal ini tentunya dapat mencakup regulasi terhadap substansi yang menimbulkan kecanduan, pengembangan program pendukung yang berfokus pada pencegahan dan pemulihan, serta kampanye edukasi publik yang menargetkan persepsi dan sikap terhadap kecanduan.

Melalui perspektif uniknya dalam mengintegrasikan ekonomi, psikologi, dan *neurosains*, *neuroeconomics* jelas memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dan pengelolaan kecanduan. Dengan terus mengeksplorasi bagaimana otak membuat keputusan di tengah konflik antara keinginan dan kebutuhan, penelitian dalam bidang ini menjanjikan untuk membuka jalan menuju pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam mengatasi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling mendesak saat ini.

Economics Of Cybersecurity: Perubahan Yang Membawa Kerentanan

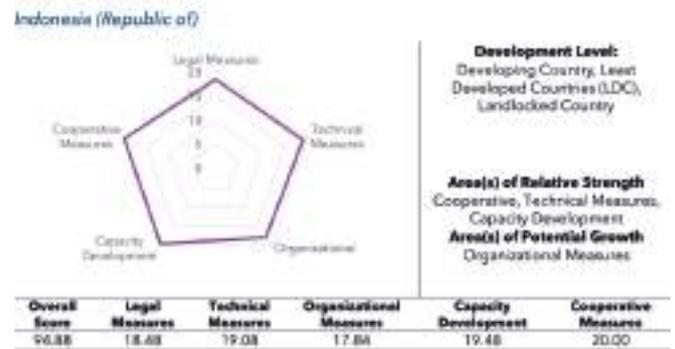
Oleh **Laurensius Farel Dwi Putranto, S.E.**
Fraud Analyst PT. Bank Central Asia, Tbk



Kondisi Keamanan Siber Di Indonesia

Seiring perkembangan dunia digital, istilah *data is the new oil* menjadi semakin relevan. Bagi industri jasa keuangan, kerentanan pada aspek keamanan data nasional berimplikasi pada *economic loss* yang dimulai dari skala mikro (rumah tangga perusahaan dan rumah tangga konsumsi).

Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat kondisi keamanan siber suatu negara adalah *Global Cybersecurity Index (GCI)*. Indeks *GCI* mengukur lima pilar kapasitas siber suatu negara, yaitu aspek hukum, aspek teknis, aspek organisasional, aspek pembangunan kapasitas, dan aspek kooperasi. Publikasi *International Telecommunication Union (2022)* menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke – 24 dari sekitar 200 negara dalam hal indeks *GCI*. Berikut grafik sebaran skor *GCI* Indonesia pada tahun 2020.



Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia cenderung memiliki kelemahan pada aspek organisasional, yaitu lemahnya konsistensi dan persistensi pada penentuan strategi keamanan siber nasional dan sedikitnya lembaga publik dan privat yang memfokuskan operasional pada keamanan siber.

Penulis menilai, kelemahan aspek organisasional ini cukup timpang dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki generasi yang cakap akan teknologi (*technological savvy*). Apabila banyak generasi cakap teknologi Indonesia yang jatuh dalam profesi *unethical hacker*, maka *gap* antara aspek organisasional dan pengembangan kapasitas akan berdampak negatif pada perekonomian.

Dampak Ekonomi Dari Kebijakan Siber

Publikasi *International Telecommunication Union (2022)* menjelaskan bahwa kerugian global dari kejahatan siber pada tahun 2021 mencapai angka USD6 triliun, meningkat 600 persen atau 6 kali lipat dari tahun 2020. Kondisi ini menggambarkan inefisiensi ekonomi yang berdampak serius pada ekonomi global. Apabila dikaitkan dengan konteks Indonesia, laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2022) menjelaskan bahwa pada tahun 2021, terdapat setidaknya 3.246 orang Indonesia yang mengalami pengurangan saldo pada rekening bank dan *e-wallet* secara *unauthorized*.



Gambar diatas menunjukkan *potential loss* yang dialami perekonomian akibat kejahatan siber pada industri jasa keuangan. Penulis menilai, *potential loss* ini memang tidak menjurus pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi pada indikator pemerataan ekonomi lainnya.

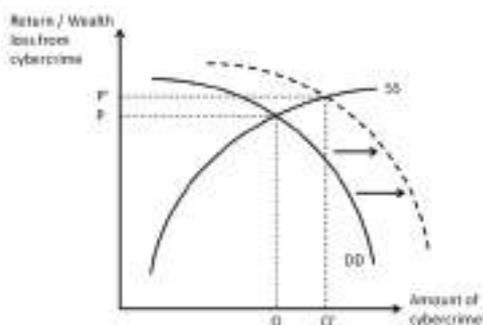
Hal ini dikarenakan, sejumlah dana yang digunakan secara *unauthorized* oleh *unethical hacker*, dengan asumsi hacker berada di Indonesia, pada akhirnya akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi yang berdampak pada PDB. Akan tetapi, pihak yang dirugikan akibat transaksi *unauthorized* ini akan kehilangan sumber daya ekonomi yang berpotensi menurunkan strata sosialnya di masyarakat.

Berdasarkan dinamika keamanan siber nasional, pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang bisa Indonesia lakukan untuk merespon disrupsi ini?

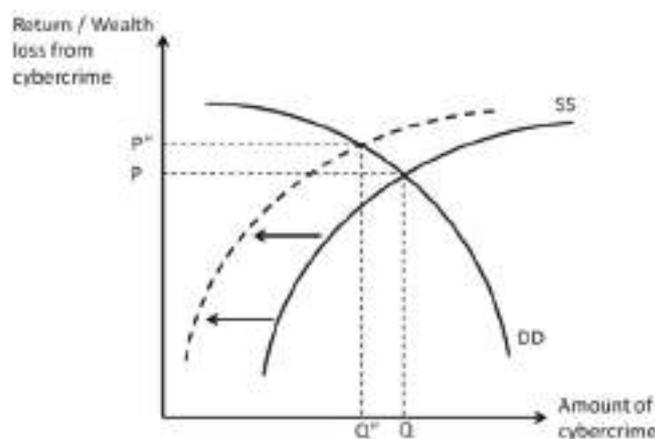
Keputusan Individu Menjadi *Unethical Hacker*

Disiplin ilmu *economics of cybersecurity*, merupakan gabungan dari ilmu komputer dan ilmu ekonomi yang salah satu fokusnya adalah menganalisis insentif yang mendorong *unethical hacker* melakukan *hacking process* dengan tebusan finansial.

Untuk mengetahui intervensi apa yang perlu dilakukan dalam merespon *unethical hacking*, kita perlu mengetahui secara singkat mengapa seseorang melakukan *hacking process*.



Pada gambar diatas disimpulkan bahwa ketika pihak korban memiliki skenario untuk meminimalkan resiko dari kejahatan siber, misalnya memiliki asuransi apabila terjadi *unauthorized transactions* pada kartu kreditnya, maka secara tidak langsung hal ini akan meningkatkan permintaan dari kejahatan siber yang pada akhirnya akan justru meningkatkan kerugian finansial yang harus ditanggung perekonomian.



Sebaliknya, pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa para *unethical hacker* menjadi tidak terdorong untuk menawarkan *hacking process* apabila sektor formal dalam perekonomian mampu memberikan *return* yang lebih menarik ketimbang *hacking process*.

Indonesia Menyikapi Serangan Siber

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa seorang *unethical hacker* sangat mempertimbangkan insentif dalam memanfaatkan semua *cost* dan *benefit* yang dihadapinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menilai, Indonesia memerlukan intervensi secara simultan dari sektor publik dan sektor privat.

Sektor publik dapat membantu mencegah maraknya generasi muda yang menjadi *unethical hacker* dengan menstimulasi kurva *supply* dari *hacking process* ke kiri atas, salah satunya dengan pelatihan teknikal pada pendidikan vokasi yang dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja di sektor publik.

Lebih jauh lagi, sektor publik dapat melakukan formulasi kebijakan fiskal yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan ekonomi.

Hal ini diperlukan mengingat fakta bahwa tidak sedikit *unethical hacker* di Indonesia berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memastikan kebijakan fiskal efektif adalah dengan meningkatkan kredibilitas penyaluran pajak, upaya pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dan alokasi anggaran dengan prinsip kerakyatan.

Sektor privat dapat membantu mendukung program pengentasan kejahatan siber dengan secara hati – hati menentukan kebijakan keamanan siber pada masing – masing perusahaan. Penulis menyarankan agar sektor privat yang memiliki akses tinggi pada data – data pribadi masyarakat, misalnya sektor perbankan, memformulasikan kebijakan toleransi resiko atas kejahatan siber secara confidential. Hal ini untuk mencegah unethical hacker mempertimbangkan besaran toleransi resiko yang dimiliki sektor – sektor privat yang memiliki akses pada data finansial masyarakat yang pada akhirnya berujung pada kerugian finansial.

Besaran batas toleransi kejahatan siber yang diterapkan setiap sektor privat harus merupakan timbangan dari penjualan. Tidak dipungkiri bahwa apabila resiko kejahatan siber ditekan pada level paling minimal, maka akan menurunkan penjualan yang justru tidak menimbulkan dampak positif bagi perekonomian. Penulis menilai apabila resiko kejahatan siber sudah ditimbang dengan hasil penjualan, dalam jangka panjang, dapat menurunkan potensi jumlah kejahatan siber.

Proporsi Pelaku UMKM Menuju Piramida Stasioner

Oleh Ely Nurhayati, S.E., M.Si

Dosen FEB Universitas YARSI &
Peneliti INDEF

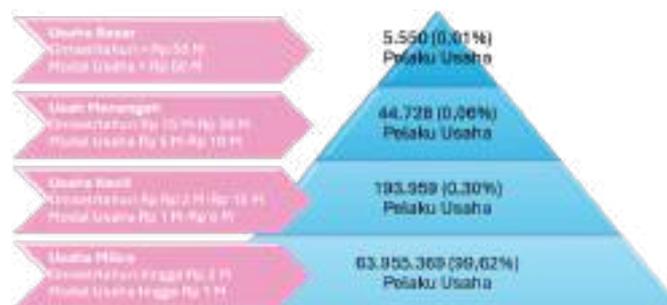


Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disingkat UMKM merupakan usaha yang banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian di dalam negeri. Tidak hanya itu, bahkan UMKM bisa disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (KEMENKOPUKM RI) tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional mencapai 60,5%, total lapangan kerja yang diciptakan hingga 99,9%, adapun penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9%, dan total investasi menembus angka 60,0%. Data tersebut menunjukkan besarnya kontribusi UMKM dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Lebih dari sembilan puluh persen pekerja di Indonesia bergantung pada lapangan pekerjaan yang ada di UMKM.

UMKM juga pernah menjadi penyelamat dan penopang perekonomian Indonesia saat krisis moneter 1998 lalu. Pada saat itu, banyak usaha besar yang mengalami guncangan, namun di sisi lain UMKM justru mampu bertahan dan mampu menjaga roda perekonomian negara dari ancaman banyaknya pengangguran.

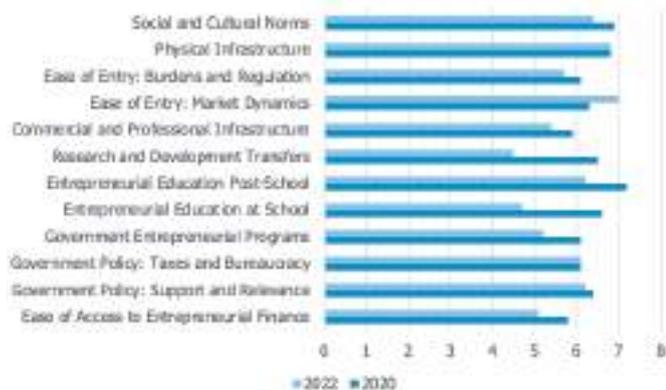
Berbeda dengan masa pandemi *COVID-19*, meskipun saat resesi yang diakibatkan oleh pandemi tersebut UMKM ikut mengalami guncangan dan tidak sekebal di masa krisis moneter 1998, namun kontribusi UMKM terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, serta investasi masih mendominasi. Hal ini dapat dilihat dari data KEMENKOPUKM RI tahun 2021 yang telah disebutkan di atas.

Namun demikian, di sisi lain sayangnya masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk naik kelas, terutama pelaku usaha mikro. Data KEMENKOPUKM menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro masih sangat mendominasi dibanding seluruh pelaku usaha. Apabila digambarkan dalam bentuk bagan, maka bagan pelaku UMKM berbentuk seperti piramida ekspansif, dimana pelaku usaha mikronya sangat jauh lebih banyak dibanding pelaku usaha kecil, menengah dan besar. Semakin besar level usahanya, semakin kecil jumlah pelakunya.

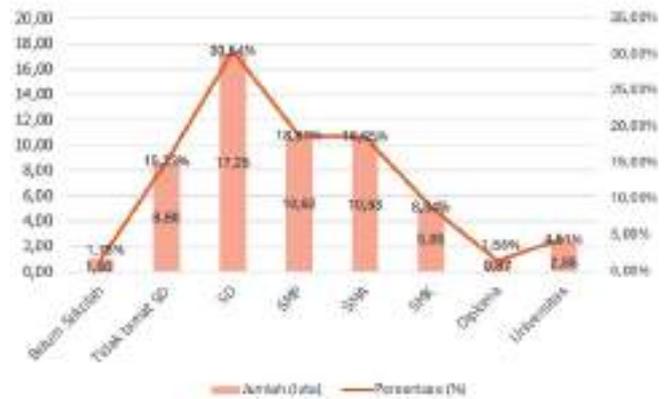
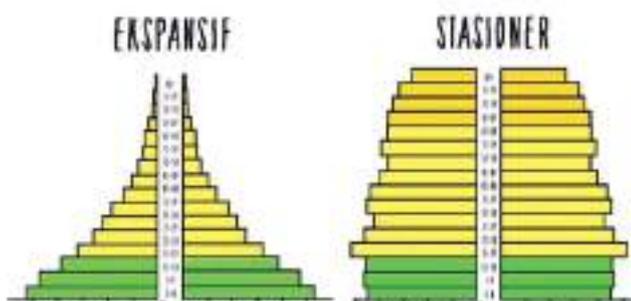


Data pada gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa terdapat gap yang sangat besar antara jumlah pelaku usaha mikro yang mencapai 63,96 juta pelaku dengan jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan besar yang hanya di kisaran ribuan hingga ratusan ribu. Data tersebut sekaligus menunjukkan PR (Pekerjaan Rumah) bangsa Indonesia untuk menaikkan kelas pelaku UMKM terutama pelaku usaha mikro, masih sangat besar. Namun di sisi lain, potensi Indonesia untuk mendapatkan limpahan dampak positif dari sisi perekonomian apabila mampu menaikkan kelas para pelaku UMKM, terutama pelaku usaha mikro, tentu juga masih sangat besar.

Apabila Indonesia berhasil mengubah piramida pelaku UMKM menjadi seperti piramida stasioner, dimana jumlah pelaku usaha mikro lebih sedikit dibanding dengan jumlah pelaku usaha kecil karena sebagian pelaku usaha mikro berhasil naik kelas, maka bukan tidak mungkin nilai kontribusi UMKM terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, serta investasi akan meningkat, dan kemudian kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.



Laporan *Global Entrepreneurship Monitor, The Entrepreneurial Framework* Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar pada beberapa indikator, yaitu Edukasi Kewirausahaan Pasca Sekolah, Edukasi Kewirausahaan di Sekolah, Program Kewirausahaan Pemerintah, dan *Transfer Penelitian dan Pengembangan*. Indikator tersebut mencerminkan beberapa highlight penting. Pertama, bahwa booster pada aspek pendidikan kewirausahaan, baik pada pendidikan pasca sekolah, di sekolah, maupun program dari pemerintah, sangat diperlukan untuk meningkatkan kelas UMKM. Kedua, indikator yang mengalami penurunan signifikan tersebut merupakan indikator dimana sebetulnya pemerintah mempunyai kesempatan, pengaruh dan peranan yang sangat besar. Karenanya keberpihakan pemerintah pada aspek pendidikan kewirausahaan pada khususnya dan pendidikan pada umumnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kelas UMKM, utamanya kelas mikro.



Pada aspek pendidikan secara umum, mayoritas pelaku wirausaha Indonesia saat ini adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2023 ada sekitar 26,85 juta wirausaha yang hanya tamatan SD. Kelompok ini setara 47,55% dari total seluruh pelaku wirausaha nasional, hampir separuh dari total pelaku wirausaha. Meskipun menjadi wirausaha tidak seperti menjadi pekerja formal yang biasanya membutuhkan ijazah, namun pendidikan tetap menjadi aspek fundamental yang dibutuhkan dalam meraih kesuksesan dalam berwirausaha, serta memperbesar peluang naik kelas dari usaha mikro ke usaha kecil.

Agar dapat sukses dalam berwirausaha, tidak hanya kecukupan modal yang dibutuhkan, namun juga ada aspek lain yang lebih fundamental yang diperlukan, yaitu *high order thinking skills* yang menurut Taksonomi Bloom disebut dengan keterampilan menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Seluruh keterampilan tersebut banyak diajarkan dan selalu diasah selama proses belajar di lembaga pendidikan formal. Karena itulah, tidak hanya pendidikan kewirausahaan, aspek pendidikan secara umum juga sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, tidak hanya para pekerja formal. Karenanya meningkatkan level pendidikan masyarakat menjadi Pekerjaan Rumah besar bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kelas UMKM. Pendidikan masyarakat harus menjadi prioritas, agar piramida pelaku UMKM dapat berubah menjadi piramida stasioner.

Bank Jago Siapkan Talenta Unggul Lewat Jago Digital Academy

Kelangkaan sumber daya manusia (SDM) siap kerja dan memiliki kompetensi digital yang sesuai kebutuhan industri menjadi tantangan utama bank berbasis teknologi untuk bisa bertumbuh secara berkesinambungan.



Sejalan dengan aspirasi Bank Jago untuk meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang melalui solusi keuangan digital, Bank Jago tidak hanya membangun bisnis perbankan dan infrastruktur teknologi informasi (IT) yang andal dan aman, tetapi juga membangun lingkungan yang berkelanjutan dengan mendorong ketersediaan SDM yang memiliki pola pikir digital dan siap kerja.



Untuk itu Bank Jago meluncurkan Jago Digital Academy (JDA). Bersama JDA, Bank Jago ingin memberi dampak positif dan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas talenta digital di Indonesia.

Jago Digital Academy

Sebuah platform pembelajaran yang dibangun oleh Bank Jago dengan berkolaborasi bersama perusahaan teknologi informasi DKatalis dan kampus-kampus terkemuka di Indonesia untuk memberdayakan, mempersiapkan, serta menumbuhkan talenta yang siap menghadapi masa depan di era digital.



Yang membedakan Jago Digital Academy dengan learning platform lain

Market-relevant & Innovative Approach

Jago Digital Academy memiliki pendekatan yang inovatif dan relevan dengan kondisi market saat ini, didukung dengan lingkungan kerja yang agile dan teknologi yang canggih.



AI-driven Global Industry Insight

Jago Digital Academy menghadirkan insight mengenai industri perbankan digital secara global dengan pendekatan yang digerakkan oleh AI agar tetap menjadi yang terdepan di era yang berkembang pesat.



Perserta Jago Digital Academy

- Karyawan
- Mahasiswa
- Mitra Ekosistem
- Publik

Learning Approach

- Self Paced Learning
- AI Augmented
- Digital Banking Use Case
- Quizzes
- Meet The Expert
- Assessment/Project

Jago Digital Academy Modules



Total ada lebih dari 50 subjek yang terbagi dalam lebih dari 200 modul. Terdapat 3 (tiga) level pembelajaran:

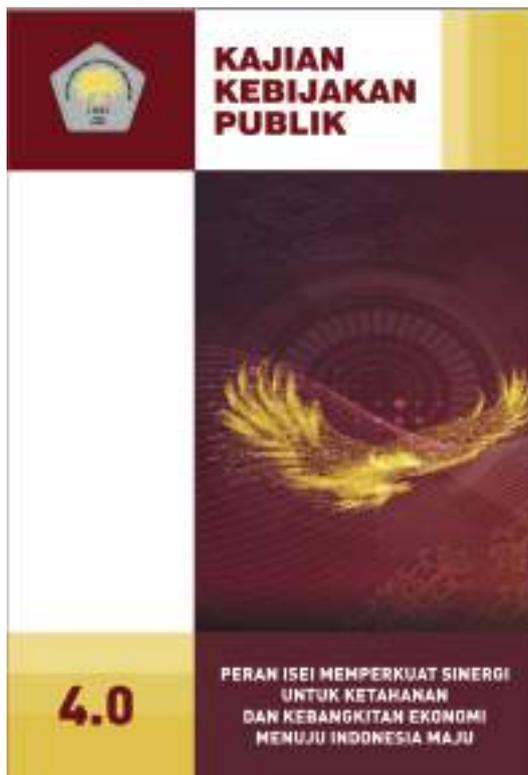
- 1 fundamental
- 2 conceptual
- 3 practical

Modul pembelajaran akan terus berkembang agar tetap relevan dengan kebutuhan.

Scan QR ini untuk tahu lebih lanjut mengenai Jago Digital Academy (JDA)



KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK 4.0



Pemulihan ekonomi global dihadapkan pada sejumlah tantangan seiring dengan efek samping dari respons kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi disertai risiko perbaikan yang tidak merata dan pergeseran sumber pertumbuhan global dari beberapa negara utama. Beberapa negara masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah risiko harga komoditas global yang relatif mereda, serta membaiknya konsumsi domestik dan kinerja perdagangan yang positif. Sementara itu, sebagian negara lainnya masih mengalami perbaikan yang melambat di tengah dampak *re-opening* yang tidak sesuai perkiraan, realisasi inflasi yang masih di atas target khususnya inflasi pangan, berlanjutnya fragmentasi ekonomi dan geopolitik global, disrupsi teknologi, serta *downside* faktor lainnya yang merupakan akumulasi kebijakan secara agresif di negara maju dalam tiga tahun terakhir. Potensi *debt trap* menjadi risiko yang perlu diantisipasi ke depan. Sulitnya akses *overseas financing* dan mahalnya bunga bank dapat menyebabkan terjadinya *spillover* ke emerging markets yang dipandang memiliki leverage tinggi dan dapat melemahkan prospek ekonomi.



[Download here](#)

Publikasi ISEI

THE 46th FEDERATION OF ASEAN ECONOMIC ASSOCIATIONS



Federasi Asosiasi Ekonom ASEAN (FAEA) *Conference* Ke-46 digelar di Yogyakarta, Indonesia. *FAEA Conference* Ke-46 kali ini, membahas isu-isu ekonomi yang relevan dengan kawasan ASEAN dan untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran ilmiah antara para ekonom, akademisi, pemerintah, serta kalangan bisnis ASEAN. Tema *The 46th FAEA Conference* adalah "*Empowering Collaboration to Shape ASEAN Economic Sustainability*". *FAEA* ini diharapkan dapat memberikan kerangka kebijakan terpadu antara kebijakan moneter, fiskal, dan transformasi struktural, yaitu transformasi sektor keuangan dan perbankan, sektor riil (industri, perdagangan, dan pertanian) untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi ASEAN pasca-pandemi yang tergambar dalam 11 poin *FAEA 46th Declaration*. Ketua Umum PP ISEI yang juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjoyo berharap konferensi *FAEA* dapat berkontribusi untuk ikut memitigasi dampak global *spillover*. Untuk itu, *FAEA* perlu menjadi pelaku penting dalam mendorong sinergi dan kolaborasi ASEAN.



[Download here](#)

Call for Paper Kongres ISEI XXII & SEMNAS 2024



**TOTAL INSENTIF
RP 100 JUTA**

**CALL FOR PAPER
KONGRES ISEI XXII & SEMNAS 2024**

"Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi dan Kebijakan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan"

01 September 2024

TEMA-TEMA TERKAIT

1. Transformasi Ekonomi
2. Kebijakan Publik
3. Inovasi dan Teknologi
4. Keberlanjutan
5. Ketahanan Pangan dan Gizi
6. Kesehatan Masyarakat
7. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
8. Energi dan Lingkungan Hidup
9. Digitalisasi dan Masyarakat
10. Kebijakan Fiskal dan Moneter
11. Kebijakan Perdagangan Internasional
12. Kebijakan Industri dan Jasa
13. Kebijakan Perumahan dan Perkotaan
14. Kebijakan Transportasi dan Infrastruktur
15. Kebijakan Sosial dan Budaya
16. Kebijakan Hukum dan Peradilan
17. Kebijakan Tenaga Kerja dan Pengangguran
18. Kebijakan Investasi dan Pengabdian Masyarakat
19. Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum
20. Kebijakan Pengabdian Masyarakat
21. Kebijakan Pengabdian Masyarakat
22. Kebijakan Pengabdian Masyarakat
23. Kebijakan Pengabdian Masyarakat
24. Kebijakan Pengabdian Masyarakat
25. Kebijakan Pengabdian Masyarakat
26. Kebijakan Pengabdian Masyarakat
27. Kebijakan Pengabdian Masyarakat
28. Kebijakan Pengabdian Masyarakat
29. Kebijakan Pengabdian Masyarakat
30. Kebijakan Pengabdian Masyarakat

www.isei.or.id | isei.busat@gmail.com | ppisei_official

Tema *Call for Paper* Kongres ISEI XXII & SEMNAS 2024 adalah "Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi dan Kebijakan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI) membuka peluang bagi mahasiswa, dosen, peneliti, akademisi, dan umum untuk dapat berkontribusi melalui *Call for Paper* Kongres ISEI XXII & SEMNAS 2024 dengan scope tema yang terkait pada flyer. Pada *Call for Paper* Kongres ISEI XXII & SEMNAS 2024 akan dipilih 20 *paper* terbaik akan dipresentasikan secara *online* pada 19 September 2024. Peserta akan memperoleh insentif Rp5 juta dan artikel akan menjadi hak milik dari PP ISEI yang akan dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi Indonesia (JEI) ISEI. Peserta dapat mengikuti *submission guideline* untuk memperhatikan *timeline* dan ketentuan penulisan artikel.



Call for Paper Information

JURNAL EKONOMI INDONESIA



Jurnal Ekonomi Indonesia didirikan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/Asosiasi Ekonom Indonesia (ISEI) pada tahun 2004. JEI menerbitkan artikel teoritis dan empiris terkait perkembangan dan dinamika perekonomian Indonesia pada skala nasional, regional, global, dan negara. studi yang menampilkan Indonesia. JEI menerima artikel yang ditulis dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia dan menilai artikel tersebut melalui proses *peer-review double-blind*



Submit Your Paper Here

PELANTIKAN ISEI CABANG YOGYAKARTA & KAFEGAMA YOGYAKARTA



Acara pelantikan ISEI Cabang Yogyakarta dan KAFEGAMA Yogyakarta dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP ISEI yakni Bapak Perry Warjiyo, Ph.D dengan melantik Prof. Didi Achjari sebagai Ketua ISEI Cabang Yogyakarta dan Dr. Bogat Agus Riyono sebagai Ketua KaAFEGAMA DIY. Ketum PP ISEI berpesan bahwa kehadiran Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) terutama ISEI Cabang Yogyakarta dan KAFEGAMA Yogyakarta harus disesuaikan dengan Visi ISEI yakni “*Guyub rukun migunani* memajukan perekonomian Nasional dan Daerah. Bentuk kehadiran komponen Akademisi, Bisnis, dan *Government* dalam ISEI merupakan komponen penting dan mendasar untuk mendukung Program Pemerintah yang bertujuan memajukan perekonomian Nasional.

Pada hakikatnya 4 Program ISEI tergambar dalam SHDI yang merupakan fokus baik pusat ataupun cabang. SHDI merupakan penjabaran sebagai berikut:

- * Stabilitas yang diharapkan ISEI dan KAFEGAMA dapat berperan membantu Pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian Nasional dan Daerah.
- * Hilirisasi yang merupakan bentuk kebijakan akselerasi perekonomian “dari rakyat untuk rakyat” pada sektor riil yakni pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pada kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kuat pada sektor pariwisata diharapkan berbagai produk hilirisasi dapat terkoneksi dengan UMKM dan pelaku pariwisata.
- * Digitalisasi yang bertujuan mendigitalisasikan multi sektor serta mendorong peran milenial yang *tech-heavy* dengan menghadirkan model ekonomi kreatif seperti *startup*, fesyen, dan juga UMKM.
- * Inklusif yakni mendorong dan merangkul berbagai komponen untuk berpartisipasi dalam perekonomian yang dapat terwujud juga melalui tahapan proses digitalisasi.

Maka dari itu, diharapkan pelantikan ISEI Cabang Yogyakarta sekaligus KAFEGAMA Yogyakarta pada Jumat Pon ini dapat sesuai dengan makna wetonnya yakni rendah ati, bertutur kata baik, baik, dan bijaksana yang dapat menjadi modal untuk memajukan perekonomian Nasional dan Daerah.

Editor: **Jonathan Ersten Herawan**

TALKSHOW DIALOG RAMADHAN



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surakarta bekerjasama dengan Infobank dan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI) mengadakan *Talkshow* Dialog Ramadhan dengan mengambil tema “Peran Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Dana Haji”. *Talkshow* dialog ramadhan diadakan sebagai bentuk acara *road to* kongres ISEI XXII dan SEMNAS 2024 yang dilaksanakan di The Alana Hotel and *Convention Center* Solo. Acara ini dibuka oleh Lukman Hakim selaku Ketua ISEI Surakarta periode 2023-2026 dan dimoderasi oleh Eko B. Supriyanto selaku Pemimpin Redaksi Infobank.

Talkshow ini menghadirkan 3 pembicara yang kredibilitasnya telah diakui di bidangnya yakni Anggito Abimanyu selaku Kepala Departemen Ekonomi dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Harry Alexander selaku anggota BP BPKH, dan Irianto Harko Saputro selaku Plt. Direktur Utama Bank Jawa Tengah. Acara ini diharapkan dapat menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai perbankan syariah dan pengelolaan dana haji.

Kelancaran pelaksanaan acara ini diharapkan dapat menjadi “*ground breaking*” bagi ISEI Surakarta dalam pelaksanaan Kongres ISEI XXII dan SEMNAS 2024 dan menjadi milestone untuk mendorong animo publik dalam pelaksanaan Kongres ISEI XXII dan SEMNAS 2024.

Tetap Semangat untuk ISEI Cabang Surakarta!

Editor: **Firman Sihol Parningotan**

Ngobrol Ramadhan (NGOBRAN) Edisi #03 ISEI Cabang Yogyakarta: UMKM Jogja Gaspol

Selama bulan Ramadhan 1445 H, ISEI Cabang Yogyakarta menyelenggarakan Ngobrol Ramadhan (Ngobran). Edisi #01 Ngobran dengan topik “Ekonomi Ramadhan” yang menjadi tuan rumah (host) Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta di Hotel Alana Yogyakarta (Sabtu, 16/03/24). Selanjutnya Ngobran edisi #02 dengan topik “Pemimpin dan Wirausaha” diselenggarakan di Alra Corner, Yogyakarta (Jumat, 22/03/24). Bertindak selaku tuan rumah Alra Group.

Acara Ngobran edisi #03 dengan topik “UMKM Gaspol: Go Digital & Go Export” diselenggarakan di Hotel Novotel Suite, Yogyakarta dengan tuan rumah Kantor Perwakilan BI DIY (Senin, 25/03/24). Acara diskusi tersebut didukung oleh Bank BPD DIY, KADIN DIY, Diskop UKM DIY, OJK DIY dan YSS Production. Hadir selaku narasumber Ibrahim (Kepala Perwakilan BI DIY), Santoso Rochmad (Dirut Bank BPD DIY), Robby Kusumaharta (Wakil Ketua KADIN DIY), Srie Nurkyatsiwi (Kadiskop UMK DIY), Jimmy Parjiman (Kepala OJK DIY) dan Y. Sri Susilo (Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta). Acara tersebut dimoderatori oleh Ronny Sugiantoro (Humas ISEI Cabang Yogyakarta).

“Pengembangan UMKM difokuskan pada Korporatisasi, Kapasitas dan Pembiayaan”, jelas Ibrahim (Kepala Perwakilan BI DIY). Selanjutnya Ibrahim menjelaskan BI juga mendorong pelaku UMKM DIY untuk Go Digital dan Go Export. Berkaitan dengan hal tersebut BI memberikan dukungan pelatihan dan pendampingan. Melalui Karya Kreatif Indonesia (KKI), UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia di seluruh Indonesia didorong untuk secara kontinyu melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk sesuai selera pasar, berorientasi ekspor, dan memanfaatkan *platform* digital agar dapat memperluas akses pasar internasional.

“KADIN DIY, sejalan dengan KADIN Indonesia, berkomitmen untuk membantu UMKM (khususnya Usaha Ultra Mikro dan Mikro) untuk maju dan berkembang untuk Gaspol Naik Kelas”, jelas Robby Kusumaharta (Wakil Ketua KADIN DIY). Berkaitan dengan hal tersebut program yang telah dilakukan KADIN DIY adalah pelatihan kemampuan ketrampilan vokasional bagi para pekerja di perusahaan UMKM.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja. Ujungnya daya saing pekerja, termasuk pelaku UMKM, di DIY semakin kompetitif.

“Bank BPD DIY terus berkomitmen memaksimalkan penyaluran kredit, terutama kredit produktif untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)”, ungkap Santoso Rochmad (Dirut Bank BPD DIY). Dengan adanya keberpihakan terhadap UMKM inilah, Bank BPD DIY berupaya membuktikan peran signifikannya dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's (SDGs)* di DIY. Bank BPD DIY terus mendukung penggunaan transaksi non tunai UMKM. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan layanan *QRIS* kepada seluruh tenant sebagai alat penerimaan pembayaran. Menurutnya melalui *QRIS*, transaksi menjadi lebih mudah, praktis, efisien dan aman.

“Diskop dan UKM DIY dengan berbagai program telah dan akan terus mendorong UMKM Gaspol, dalam hal Go Digital dan Go Export”, tegas Srie Nurkyatsiwi (Kadiskop UMK DIY). Dinas Koperasi dan UKM DIY meluncurkan SiBakul Jogja, platform digital serta fasilitasi pemasaran produk UKM. SiBakul Jogja sebagai *platform marketplace*, menyadari bahwa biaya pengiriman dapat menjadi kendala bagi konsumen. Oleh karena itu, SiBakul menciptakan ide layanan gratis ongkir untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen. Dengan layanan ini, pengguna dapat menikmati pengiriman barang tanpa ada biaya tambahan. Fasilitas gratis ongkir ini juga menjadi daya tarik promosi bagi konsumen, dimana secara umum pembeli cenderung lebih memilih berbelanja di tempat yang menawarkan layanan pengiriman gratis.

“OJK berkomitmen mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan antara lain melalui digitalisasi penyaluran pembiayaan”, jelas Jimmy Parjiman (Kepala OJK DIY). Selanjutnya, OJK juga mendukung perluasan ekosistem digital UMKM terintegrasi dari hulu sampai hilir, meliputi digitalisasi pengadaan bahan baku, proses produksi, pemasaran di dalam dan luar negeri sampai dukungan pembiayaan.

OJK dan Industri Jasa Keuangan juga melakukan berbagai aktivitas pembinaan dan pendampingan kepada UMKM. Dengan dukungan tersebut diharapkan UMKM segera bangkit dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Dukungan dan fasilitasi dari Diskop UKM DIY dan Bank Indonesia DIY selama ini membantu dalam pemasaran produk furniture kami baik di pasar domestik dan pasar ekspor”, jelas Windu Sinaga salah satu pengusaha menengah yang telah mampu memasarkan produknya di pasar luar negeri. Menurut Windu, fasilitasi pemasaran baik pameran di dalam maupun di luar negeri menjadikan produknya dikenal oleh konsumen. Selanjutnya, Windu berharap tetap dibantu dan difasilitasi untuk memasarkan produknya oleh pemangku kepentingan.

“Untuk mendorong UMKM DIY Gaspol, *Go Digital & Go Export*, pemangku kepentingan harus bersinergi dan berkolaborasi”, harap Y. Sri Susilo (Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta) yang juga dosen FBE UAJY. Menurut Susilo, Perguruan Tinggi (PTN/PTS) yang memiliki sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) namun minimal sumber dana, dapat berkontribusi melalui program Abdimas, KKN serta Magang MBKM. Sumber pendanaan dapat berasal dari CSR perusahaan dan perbankan, Diskop UKM DIY, Bank Indonesia DIY dan sebagainya. Momentum Program MBKM seharusnya dapat digunakan oleh PTN/PTS untuk berkontribusi lebih nyata dalam mendorong UMKM Naik Kelas.

Setelah acara Ngobran edisi #03 berakhir dilanjutkan dengan pembagian cinderamata dan buka puasa (bukber). Hadir sekitar 20 peserta diskusi, antara lain Dian Ariani (Bank BPD DIY), Tim Apriyanto (KADIN DIY), Lincoln Arsyad (FEB UGM), Amirullah Setya Hardi (Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta), D. Wahyu Ariani (Dosen FE UMB), Rudy Badrudin (Pelaku UMKM), Bambang P Hadi (Pelaku UMKM) dan Budiharta Setyawan (Pembina UMKM). Selaku tuan rumah acara ini adalah Kantor Perwakilan BI DIY. “Untuk minggu depan Ngobran edisi #04 dengan topik pariwisata diselenggarakan oleh Bank BPD DIY”, demikian jelas Y. Sri Susilo koordinator Ngobran ISEI Cabang Yogyakarta.

Editor: **Yuvensius Sri Susilo**

BANK GANESHA

MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses

ATAS TERBITNYA

WARTA ISEI VOL. 1 NO. 1, JUNI 2024



    @bankganesha

Bank Ganesha bertahap dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

 **live chat**
www.bankganesha.co.id

CALL
GANESHA
1500 169

WORKSHOP 2 Day Workshop Firm Wide Stress Testing Batch #15



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengadakan kegiatan *Workshop 2 Days Firm Wide Stress Testing* yang diikuti oleh perwakilan bank umum diantaranya, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, PT. Bank Central Asia. Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dan akademisi dari beberapa Universitas yang merupakan konstituen ISEI. *Workshop* yang diadakan selama dua hari dan dibawakan oleh Benny K. Yudiaatmaja, FRM. Benny aktif sebagai konsultan pemodelan risiko pasar, IRRBB, risiko kredit & risiko operasional dan perancang *software* manajemen di beberapa bank.

Pelatihan ini dilaksanakan tanggal 24 - 25 April 2024 di Sekretariat PP ISEI dan sangat sesuai bagi profesional yang ingin mendapatkan pemahaman tentang *stress testing* yang komprehensif terhadap risiko fundamental termasuk metodologi dan berbagai pemodelan risiko untuk *Scenario-Based Stress Testing*.

Penggunaan *machine learning* yang dilengkapi dengan contoh pemodelan riil menggunakan program R dalam bentuk *web app & mobile app*. Selain itu juga dibahas pembuatan skenario menggunakan *Monte Carlo Simulation* dan juga pembahasan mengenai *reverse stress testing*. Agenda pelatihan diisi dengan materi: *Introduction to Stress Testing, Measure Of Core Risks, Risk Modelling, Stress Test Methodologies, Stress Test - Market Risk & IRBB, Performing Stress Test - Credit Risk, Performing Stress Test - Liquidity Risk, OpRisk & Other Risk, dan Risk Integration & Reverse Stress Test*

Workshop ditutup dengan sesi foto bersama dengan Ibu Dr. Avilliani selaku Pengurus Pusat Bidang III ISEI dan semua peserta merasa senang mendapatkan kesempatan untuk mengabadikan foto bersama.

Editor: **Jonathan Ersten Herawan**

Bedah Buku & *Workshop Inter Regional Input Output (IRIO)*



Pada tanggal 13 Mei 2024, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengadakan *Workshop Inter Regional Input Output (IRIO)* dengan bekerjasama dengan BI *Institute*, Perbanas *Institute*, Lamemba, IPB University, dan ITAPS. Tabel *Inter Regional Input-Output (IRIO)* Indonesia 2016 merupakan salah satu bahan untuk analisis dan proyeksi ekonomi dalam menyusun dan mengembangkan perekonomian kewilayahan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Tabel *IRIO* merupakan angka yang disusun berdasarkan Tabel *Input-Output (IO)* dari 34 provinsi di Indonesia sehingga Tabel *IRIO* disusun berdasarkan 34 provinsi dan 52 industri.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, kami berharap para peserta dapat memperdalam pengetahuan mereka mengenai Tabel *Input Output* dan meningkatkan kemampuan analitis mereka dalam memahami dinamika ekonomi yang dibawakan oleh Prof. DR. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec. selaku Rektor PERBANAS *Institute*, Guru Besar IPB University & Pengurus Pusat Bidang III PP ISEI, Dr. Sahara, SP., M.Si. selaku Direktur ITAPS & Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA., Ph.D. selaku Direktur Perencanaan dan Pembangunan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional BAPPENAS RI, dan dimoderasi oleh Yohanes Berenika Kadarusman, Ph.D. dalam sesi Bedah Buku *IRIO*.

Sesi *Workshop IRIO* dilaksanakan setelah sesi Bedah Buku *IRIO* yakni oleh Dr. Sahara, SP., M.Si., Mutiara Probokawuryan S.E.,MMGT (Econ)., dan Wildan Nur Arrasyid, S.E. selaku peneliti dari ITAPS FEM IPB yang dilaksanakan dalam beberapa materi aktual. *Workshop* ini diikuti oleh 50 peserta yang hadir secara *on-site* dan 200 peserta secara *online*.

Editor: Jonathan Ersten Herawan

Workshop Manajemen Jurnal Ilmiah & Editorial Manuskrip



Dalam rangka meningkatkan kemampuan peningkatan pemahaman penulisan dan strategi manajemen jurnal serta melakukan kegiatan editorial terhadap manuskrip karya ilmiah, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersama dengan Bank Indonesia *Institute*, Perbanas *Institute*, dan LAMEMBA selaku lembaga profesi. Kegiatan *workshop* ini menjadi sangat penting dan relevan untuk meningkatkan *research quality* dalam rangka menyambut akreditasi AACSB untuk mendorong kualitas terbitan publikasi dan manajemen jurnal di kampus-kampus yang menjadi konstituen ISEI.

Dengan mengundang pada ahil di bidangnya seperti Prof. Dr. Ir. M. Faiz Syaib, M.Agr. selaku Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Yoga Dwi Ananda, S.T. selaku Koordinator Jurnal dan Publikasi Ilmiah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Dr. Rajab Ritonga, M.Si. selaku Guru Besar Ilmu Komunikasi & Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, dan Prof. Jaka Sriyana, Ph.D. selaku Guru Besar Universitas Islam Indonesia & *Associate Editor Economic Journal of Emerging Markets* (Sinta 1).

Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang hadir secara *on-site* dan 200 peserta yang hadir secara *online* melalui media Zoom Perbanas Institute. Peserta menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dan membantu mereka selaku pengelola jurnal untuk menghadirkan profesionalitas dalam pengelolaan jurnal. Besar harapannya kegiatan ini akan berdampak positif meningkatkan akreditasi jurnal konstituen ISEI.

Editor: **Firman Sihol Parningotan**

Bedah Buku Terobosan dalam Analisis Data dan Publikasi Ilmiah & *Workshop* RStudio



Bekerjasama dengan Bank Indonesia Institute, LAMEMBA, dan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengadakan kegiatan bedah buku terobosan dalam analisis data dan publikasi ilmiah serta wroskhop dengan menggunakan *software RStudio* sebagai upaya menghindari penggunaan *software* bajakan dalam pembuatan riset di Indonesia. Penggunaan *software* yang berlisensi atau dapat diakses secara gratis merupakan etiket yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mewujudkan keluhuran dalam melakukan riset.

Kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Nasional ini berlangsung secara meriah dimana sebanyak 250 peserta hadir secara *on-site* terdiri dari mahasiswa baik program sarjana, pasca sarjana, dan doktoral dari Universitas di Bali. Bedah buku yang dibawa oleh Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Ec. selaku Rektor PERBANAS Institute, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB & Wakil Ketua Bidang III ISEI Pusat, Prof. Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.Si. selaku pengurus pusat bidang III ISEI, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Giantri, M.Si. selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dan Gede Crisna Wijaya, S.E., M.Si. selaku Dosen Universitas Pendidikan Nasional Denpasar berjalan dengan meriah.

Kegiatan *workshop* juga dilakukan secara *on-site* dan *online* dengan dibantu oleh Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. *Workshop RStudio* dibawa oleh Prof. Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.Si. dan Gede Crisna Wijaya, S.E., M.Si. *Workshop* tersebut dibuat untuk memastikan kualitas riset yang baik dan berbudi luhur dengan memanfaatkan *software* yang legal.

Editor: **Firman Sihol Parningotan**

Refresher Course In Economics: The New Neoclassical Synthesis



Kegiatan *Refresher Course in Economics* menjadi kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para akademisi, praktisi, peneliti, anggota ISEI Cabang karena akan membahas perkembangan teori-teori ekonomi yang sedang aktual saat ini. Kegiatan *Refresher Course in Economics* yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Institute kali ini mengusung topik pembahasan mengenai “*The New Neoclassical Synthesis*”. Materi tersebut sangat penting didapatkan dan menjadi krusial ditengah kondisi *global fracturing* dimana *brittle*, *anxious*, *non-linear*, dan *incomprehensible* makin meliputi dunia.

Optimisme tentu akan selalu ada dan harus menjadi pegangan bagi para pemangku kepentingan terutama di bidang moneter dimana berbagai kompleksitas global terus terjadi dan harus dimitigasi agar tidak terjadi *circumstances* yang dapat mengakibatkan krisis keuangan domestik. Kegiatan sektor riil yang saat ini dipengaruhi oleh berbagai hal membuat persamaan matematis dan ekonometri harus dilengkapi dengan pengamatan *behavioural* atau secara lebih advance dengan pelibatan neurosains untuk mengamati berbagai pergeseran untuk memastikan relevansi dengan real *business cycle*.

Kegiatan yang dibawakan oleh Prof. Dr. Insukindro, M.A. selaku *Expert Panel* Eksternal Bank Indonesia Institute & Guru Besar FEB UGM dan Jahen Fachrul Rezki, Ph.D. selaku Wakil Kepala Penelitian LPEM FEB UI & Dosen FEB UI menjadi sangat menarik karena membahas berbagai perkembangan teori moneter yang berkembang dan upaya apa yang perlu diperhatikan bagi akademisi/praktisi/*policy maker* untuk menghadapi perkembangan global.

Menariknya, walaupun kegiatan ini diadakan melalui media Zoom tetapi antusias peserta sangat tinggi hingga diikuti sebanyak 200 peserta dengan berbagai latar belakang dan juga tersebar hingga diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Kegiatan seperti ini seharusnya rutin dilakukan oleh ISEI untuk memastikan hadirnya ekonom dalam berbagai isu dan permasalahan domestik maupun global.

Editor: **Jonathan Ersten Herawan**



FAKULTAS BISNIS
DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS JEMBER



Fakultas Bisnis
UKDW



ONLINE WORKSHOP

PERSONAL BRANDING UNTUK KARIER

Welcome Remarks



Wenefrida Mahestu Noviantra
Krisjanti, M.Sc., Ph.D.
Dekan FBE UAJY & Dosen Program Studi
Manajemen FBE UAJY



WAKTU

Selasa, 02 Juli 2024
Pukul 07.30 - 12.30 WIB

Opening Speech



Prof. Christantius Dwiatmadja, Ph.D.
Wakil Ketua Bidang III PP ISEI &
Guru Besar UKSW



MEDIA

Zoom Pro
Peserta diharapkan dapat bergabung
dalam grup WhatsApp untuk konfirmasi
link zoom pada hari pelaksanaan

Fasilitator



Api Adyantari, S.A., M.B.A.
Dosen Program Studi Manajemen FBE UAJY &
Editor in Chief Jurnal KINERJA



INVESTASI

Mahasiswa = Rp50.000
Fresh Graduate = Rp100.000
Umum = Rp100.000



Ambar Kusuma Astuti, S.E., M.Si.
Wakil Rektor II UKDW & Dosen Prodi
Manajemen FB UKDW

Register Here



Moderator



Vonezyo Yupanzara Dhamoresz, S.E., M.B.A.
Dosen Program Studi Manajemen FBE UAJY

Closing Remarks



Anika Faisal
Sekretaris I PP ISEI &
Non Executive Board Member PT. Bank Jago. Tbk.

bit.ly/ProfesionalLearningISEI



+62-882-2734-8958 (Jonathan)



isei.pusat@gmail.com



ppisei_official

ISEI ONLINE WORKSHOP SERIES: APLIKASI ANALISIS DETERMINISTIK & STOKASTIK



FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS NEGERI JAWA TENGAH

ISEI ONLINE WORKSHOP SERIES

Aplikasi Analisis Deterministik & Stokastik

<p style="text-align: center;">Data Envelopment Analysis (DEA)</p> <p>Sabtu, 13 Juli 2024 13.00 - 16.00 WIB</p> <p>Materi: Pengantar DEA dan Software DEA, Aplikasi Analisis CCR/CRS, dan Aplikasi Analisis BCC/VRS.</p> <p style="text-align: center;">Rp150.000,-</p>	<p style="text-align: center;">Analytical Hierarchy Process (AHP)</p> <p>Sabtu, 27 Juli 2024 13.00 - 16.00 WIB</p> <p>Materi: Pengantar AHP, Aplikasi Analisis Berbasis Kuesioner & Non-Kuesioner, dan Finalisasi Metode AHP.</p> <p style="text-align: center;">Rp150.000,-</p>
<p style="text-align: center;">Regresi Time Series</p> <p>Jumat, 02 Agustus 2024 18.30 - 22.00 WIB</p> <p>Materi: Pengantar Ekonometrika Time Series, Regresi PAM, dan Regresi ARDL.</p> <p style="text-align: center;">Rp150.000,-</p>	<p style="text-align: center;">Regresi VAR & VECM</p> <p>Jumat, 16 Agustus 2024 18.30 - 22.00 WIB</p> <p>Materi: Analisis Regresi VAR, Analisis Regresi VECM, dan Aplikasi VAR & VECM Pada Riset.</p> <p style="text-align: center;">Rp200.000,-</p>
<p style="text-align: center;">Regresi Data Panel Statis</p> <p>Jumat, 30 Agustus 2024 18.30 - 22.00 WIB</p> <p>Materi: Pengantar Ekonometrika Data Panel dan Studi Kasus Aplikasi Data Regresi Panel Statis.</p> <p style="text-align: center;">Rp200.000,-</p>	<p style="text-align: center;">Tabel Input-Output</p> <p>Sabtu, 07 September 2024 13.00 - 16.00 WIB</p> <p>Materi: Pengantar Tabel I-O, Analisis Tabel I-O Hipotetik, dan Analisis Tabel I-O pada Hilirisasi Nikel di Maluku Utara.</p> <p style="text-align: center;">Rp150.000,-</p>

Fasilitas:

1. E- Certificate
2. E- Modul
3. Dataset
4. Networking

KUOTA MINIMAL 10 PESERTA

Pendaftaran: bit.ly/ISEIworkshopAAE

Bagi Peserta Yang Mendaftar 6 Series Workshop Mendapatkan Diskon Biaya Investasi Dari **Rp1.000.000** Menjadi **Rp850.000** dan Bonus Instalasi Software E-Views 12.

Media Pelatihan:

Instalasi E-Views 12
offline instal file
+62 821 8740007 (Pusat)

+62-882-2734-8958 (Jonathan)

isei.pusat@gmail.com

ppisa_official

SILABUS ISEI ONLINE WORKSHOP SERIES

Analytical Hierarchy Process (AHP)

1. Pengantar dan Fungsi AHP.
2. Tahapan Analisis AHP.
3. Contoh Sederhana Konseptual Hierarki.
4. AHP Kasus Kuesioner Pada Industri *Backpack*.
 - a. Langkah-langkah Membuat Kuesioner.
 - b. Analisis AHP Kasus Kuesioner.
5. AHP Kasus Non- Kuesioner Pada Industri *Backpack* di Indonesia.
 - a. Penentuan Indikator dan Ranking.
 - b. Penentuan Nilai Skala.
 - c. Penilaian *Scoring*.
6. Interpretasi Analisis AHP Kuesioner dan Non-Kuesioner.

Data Envelopment Analysis (DEA)

1. Definisi dan Manfaat Analisis DEA.
2. Karakteristik Metode DEA.
3. Kelebihan dan Kelemahan DEA.
4. Metode dan Analisis *CRS/CCR* Sektor Pariwisata Pulau Jawa-Bali.
 - a. *Input Oriented – Constant Return to Scale (CRS/CCR)*.
 - b. *Output Oriented – Constant Return to Scale (CRS/CCR)*.
5. Metode dan Analisis *BCC/VRS* Angka Harapan Hidup Kawasan Timur Indonesia.
 - a. *Input Oriented – Variable Return to Scale (VRS/BCC)*.
 - b. *Output Oriented – Variable Return to Scale (VRS/BCC)*.
6. Konsep Penentuan Efisiensi.
7. Pengenalan Solver DEA dan *Visual Basic of Application (VBA)* di Ms. Excel.

Regresi Time Series

1. Konsep Model Ekonometrika Dinamis Pada Sektor Perbankan Indonesia.
2. Fungsi Lag.
3. Estimasi *Distributed Lag Model: Ad Hoc Approach*.
4. Estimasi *Distributed Lag Model: Koyck Approach*
5. *Adaptive Expectations Model*.
6. *Partial Adjustment Model (PAM)*.
7. Estimasi Model Dinamis Dengan Metode *OLS*.
8. *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)*.
9. *Unit Root Test, Cointegration Test, dan Causality Test*.

Regresi VAR/VECM

1. Uji Stasioneritas (*Uji Root Test*).
2. Uji lag Optimal (Penentuan Panjang Lag).
3. Uji Stabilitas.
4. Uji Kausalitas *Granger*.
5. Penentuan Regresi Model *VAR/VECM* Pada Data Makroekonomi Indonesia.
6. *Impulse Response Function (IRF)*.
7. *Variance Decomposition (VD)*

Regresi Data Panel Statis

1. Kelebihan Penggunaan Data Panel Pada Ekonomi Sirkular Indonesia.
2. *Constant Coefficient Model*.
3. *Fixed Effect Least - Squares Dummy Variable Model*.
4. *Fixed Effect Within - Group Estimator*.
5. Kriteria Pemilihan Model.

Analisis Tabel *Input-Output*

1. Pengantar Tabel *Input-Output*.
 - a. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
 - b. Tahapan Agregasi.
2. Tabel *Input-Output* Indonesia.
 - a. Berdasarkan Penilaian Transaksi.
 - b. Hubungan Antar Tabel.
3. Fungsi Tabel *Input – Output* untuk Menganalisis *Supply Chain* Industri Nikel.
4. Analisis Tabel *Input-Output* Pada Program Hilirisasi Nikel di Maluku Utara.
 - a. Analisis *Backward Linkage* dan *Forward Linkage*.
 - b. Analisis Nilai Tambah (*Value Added*).

TECH SAVVY GENERATION



Jonathan
10.03.24

MARS ISEI

$\text{♩} = 108$ **intro** **3**

A bait 1

5 Ka-mi Sar - ja-na E-ko-no-mi in - san-dar-ma lu-hur cen-de-ki - a ber - sa-
pung-ga-wa ne - ge - ri ter-depan I - krar

B bait 2

10 tu — pa - du kar ya dan — kar sa ber ge-rak ma-ju-kan e - ko - no - mi I - ka
kan — s'ma-ngat dan ker - ja — nya-ta meng-ga - pai — ci - ta ci - ta mul - ya —

C bait 3

14 tan Sar-ja-na E-ko-no-mi In-do-ne-sia a - ka-de-mi-si bis-nis go vern-men ber-ba
meng-ha da - pi — tan - ta - ngan da-lam

D bait 4/ pre chorus

18 gai — pro-fe - si ber-him pun sa - tu ter - i - kat ra-pat da lam ba-ri - san be-ra
pro - fe sio-na-lis - me yang han-dal me-nu - ju ma-sa de pan ge-mi - lang

E chorus / refrain

22 gam a - ne-ka bu-da - ya nu - san - ta-ra i - tu - lah ke-kwa-tan bang - sa ta - nah

26 su - bur la-u - tan lu - as nan mem-ben-tang ja - ya - lah In - do - ne - sia
I - SEI ma - ju ber - sa - ma

30 Ka - mi lah In - do - ne - sia
ma - ju ber - sa - ma

Oleh: Afriza Animawan/Anggito Abimanyu

Kompilasi Syair dari: Wildan Syafitri (ISEI Malang); Eduard Michelis Adventa Wardhana (ISEI Solo);

Arif Rahman (ISEI Medan); Indriayu Afriana (ISEI Jakarta)

Supervised by: Perry Warjiyo, Yoga Affandi, Jahja Setiaatmadja, Edhie Purnawan, Anggito Abimanyu,

Ari Kuncoro dan Eko B. Supriyanto



WARTA ISEI

EDISI AGUSTUS

Warta ISEI merupakan publikasi yang membahas fenomena atau isu hangat, penting, dan perkembangan terkini yang ditulis dalam karya tulis populer.

Ketentuan Naskah

- Berisi 800-1.000 kata.
- Menggunakan pedoman PUEBI.
- Berbentuk dokumen word dengan font Tahoma, size 12, single-spaced pada kertas bentuk A4 dengan margin halaman 3 cm.
- Dapat melampirkan gambar yang terkait dengan konten naskah.

Tema Naskah

"IKN Sebagai Wujud Pemerataan Pembangunan Perekonomian Daerah dan Nasional."

Pengiriman Naskah

warta@isei.or.id

Deadline: 17 July 2024

Contact Person



+62 821-1273-4541 (Fiman S.P.)



@ppisei_official

Template Naskah



bit.ly/publikasiwartaisei

Tertarik Beriklan di Warta ISEI?



bit.ly/MediaOrderWartaisei



Sinergi dan Kolaborasi
Pusat dan Daerah

WARTA ISEI

VOLUME 1

NO. 1

JUNI 2024



IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Gedung Kantor Pusat ISEI

Jl. Daksa IV No.9, Jakarta 12110

Telp. : (021) 2277 2577

Fax : (021) 720 1812

Email : isei.pusat@gmail.com

Instagram : [ppisei_official](https://www.instagram.com/ppisei_official)

Linkedin : [Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia](https://www.linkedin.com/company/ikatan-sarjana-ekonomi-indonesia)

<https://isei.or.id/>